

PENGELOLAAN PASAR DESA BERBASIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

(Studi Kasus pada Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Wisnu Ginanjar Basuki

NIM: 0910310135



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PULIK

MALANG

2016

MOTTO

**“Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji,
Sugih Tanpa Bondho”**

**(Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan
atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan; Kaya
tanpa didasari kebendaan)**

-Sunan Kalijaga-



TANDA PERSETUJUAN



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI



RINGKASAN

Wisnu Ginanjar Basuki, **Pengelolaan Pasar Desa Berbasis Pembangunan Partisipatif (Studi Pada Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**, Ketua: Dr. Choirul Saleh, M.Si. Anggota: Drs. Heru Ribawanto, MS (153 + xi)

Seiring dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang desa seperti UU Nomor 22 th 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 th 2004 dan yang terbaru UU Nomor 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah, memberikan landasan yang kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Independent Community*" yaitu desa dengan masyarakatnya berhak bicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa berhak dan bertanggungjawab atas perkembangan wilayahnya. dalam hal ini tentunya bersangkutan dan berkaitan erat dengan aspek pembangunan desa konsep pembangunan desa yang perlu di pertimbangkan adalah bahwa pembangunan desa haruslah ditujukan pada terciptanya pembangunan yang berlanjut. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mendirikan sebuah Pasar Desa sebagai sarana untuk mencapai tujuan daripada pembangunan desa. Keberadaan Pasar Desa Landungsari diharapkan mampu meningkatkan beberapa aspek di desa seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan SDM, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teori Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan, Teori Pembangunan, Pengelolaan, Konsep Dasar Partisipasi. Fokusnya adalah melihat bagaimana pengelolaan Pasar Desa Landungsari demi menunjang pembangunan Desa Landungsari dengan menggunakan teori partisipatif sebagai landasan. Lokasi penelitian di Kabupaten Malang dengan situs di Desa Landungsari Kecamatan Dau. Sumber data berasal dari sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi data, menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Sedangkan data yang diperoleh dianalisa menggunakan model analisa data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Landungsari sebagai wadah yang mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan desa Tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Proses Pengawasan juga berjalan tidak optimal dikarenakan permasalahan internal panitia pengelola pasar. Dengan kata lain pengelolaan Pasar Desa Landungsari tidak sesuai. Kegagalan ini dapat disebabkan konsep *control top-bottom* yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Alangkah lebih baiknya jika perangkat desa dan panitia pengelola pasar desa menggunakan konsep partisipasi masyarakat. Dimana perangkat desa dan panitia pengelola pasar memberikan kesempatan untuk membuka aspirasi masyarakat atau pedagang Desa Landungsari dengan memulai pembangunan *bottom-up*.

SUMMARY

Wisnu Ginanjar Basuki, **the Village Market Management Based Participatory Development (Studies in the Village Market Landungsari Dau District of Malang)**, Promotor: Dr. Choirul Saleh, M.Sc. Co-Promotor: Drs. Heru Ribawanto, MS (153 + xi)

Along with the release of some of the legislations which governs the village such as UU No 22 year 1999, which was later refined by UU No. 32 year 2004 and the most recently UU No. 23 year 2014 about local government, it provides a strong foundation for the country in realizing the "Independent Community" of the village with the community which have a right to speak for the interests of their own people. The village has the right and responsibility for the development of their territory. In this case, of course, it is concerned and closely related to the rural development aspects. The concept of rural development which needs to take as consideration is that the development of the village must be aimed at the implementation of sustainable development. In an attempt to do a development, the village government of Landungsari, Dau Subdistrict Malang has established a Village Market as a means to reach the goals of the village development. The presence of the Village Market Landungsari is expected to improve several aspects in the village, such as economic growth, the growth of human resources, etc.

This research uses descriptive method with a qualitative approach, and also uses the theory of Administrative Development, Development, and Management. The focus of the study is to find how the management of the Landungsari Village Market can give support to the village development which is fundamentally looked from the perspective of participatory theory. The research location is in Malang Regency with the site in the Dau Village, Subdistrict of Landungsari. Source of data were derived from primary data source which were obtained from interviews, observation, and documentation. Data was collected by means of triangulation of data, put the researcher as the main instrument. While, the data obtained were analyzed using data analysis models from Miles and Huberman.

The results showed that the presence of Landungsari market as an institution that supports the achievement of the objectives of rural development is not functioned as it should be. At the process of formulating the market, the chief of the village did not involve the society as a means of community participation, instead the decision was derived from the Market Management Committee which was formed and accepted by the chief of the village. The supervision process also does not run optimally due to the problems of internal market management committee. In other words, the management of the Village Market Landungsari is not appropriate. This failure can be due to a top-bottom control concepts that are not relevant to the conditions and it makes the community as objects of development. It would be much better if the village committee and the village market management use the concept of public participation, in which the village and the market management committee provide an opportunity to open the aspirations of the community or village traders of Landungsari to start a bottom-up development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengelolaan Pasar Desa Berbasis Pembangunan partisipatif (Studi pada Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Mudjiyanto dan Ibu Ketut Sutiarti, yang tidak pernah lelah berdoa serta memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing atas dukungan dan kesabarannya dalam memberikan banyak masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing atas kesabarannya dalam memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini

7. Bapak Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP selaku Penguji I atas kesediaannya dalam memberikan saran serta kritik yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini
8. Bapak Ainul Hayat, S.pd, M.Si selaku Penguji II atas kesediaannya dalam memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam menyempurnakan skripsi ini
9. Seluruh Dosen dan tenaga Pengajar Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah berkenan membimbing dan membagi ilmu selama proses penulis menempuh gelar sarjana
10. Bapak Saiful Imam, S.Ag selaku Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan riset
11. Bapak Prayit selaku pedagang di Pasar Landungsari yang telah berkenan membantu memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan ini
12. Seluruh keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungannya kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini
13. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) Universitas Brawijaya, Indonesia Nerazzurra Disstretto Malang (IN MALANG) dan World Merit Indonesia (WMI) Batch 1 Chapter Malang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
14. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada sdr. Ahmad Miftakhul Khoiri, Muthiah Bahanan, dan Abi Ridho Wicaksono yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi menambah wawasan penulis demi tercapainya solusi penyelesaian di skripsi ini
15. Teman-teman 2009 seperjuangan di Grup Penyamun yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam proses penyelesaian skripsi masing-masing
16. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam lembar ini yang telah sersedia berbagi ilmu serta memberikan motivasi dalam dunia penelitian dan penulisan kepada penulis, Terima Kasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2016

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Administrasi Publik.....	14
B. Administrasi Pembangunan	17
C. Teori Pembangunan	25
D. Pengelolaan	42
E. Konsep Dasar Partisipasi.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Fokus Penelitian	75
C. Jenis dan Sumber Penelitian.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	77
E. Instrumen Penelitian.....	78
F. Analisis Data	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	109
C. Analisis Dan Pembahasan	126
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Delapan Tangga Partisipasi Arnstein	69
Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	82
Gambar 3. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa.....	94
Gambar 4. Papan Nama Pasar Desa Landungsari.....	104
Gambar 5. Kondisi Kios Pasar Landungsari	104
Gambar 6. Kondisi samping Pasar Landungsari bagian barat	105
Gambar 7. Bagian dalam Pasar Desa Landungsari	106
Gambar 8. Bagian depan Pasar Landungsari	106
Gambar 9. Bagian samping sebelah barat Pasar Landungsari	107
Gambar 10. Bagian depan Pasar Landungsari	108
Gambar 11. Bagian depan Pasar Landungsari tampak dari samping.....	108



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat	73
Tabel 2. Daftar Nama Kepala Desa.....	93
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	95
Tabel 4. Tabel Tamatan Sekolah Masyarakat	96
Tabel 5. Tabel Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya.....	98
Tabel 6. Nama-Agama dan Pemeluknya.....	99
Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.....	100



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang demikian lebih akrab disebut Otonomi daerah di lingkup yang lebih luas dan Otonomi Desa di lingkup pedesaan. Dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang desa seperti UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan yang kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Independen Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak bicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan republik Indonesia terbentuk. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang ke berbagai bentuk. Sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memberikan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang berpedoman kepada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

peraturan Desa bertujuan:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk membangun potensi Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;

- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan

Demikian dari penjabaran Pasal 4 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan desa merupakan hal yang utama dalam mendorong kemajuan berbagai bidang di kawasan pedesaan. Pembangunan desa sendiri tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan secara umum. Keterkaitan ini memiliki fungsi dan dalam proses di dalamnya yang berkesinambungan untuk membuahkan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Bintarto (1977) yang dikutip dalam Mubyarto (1988:57) desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa berkaitan sekali dengan pembangunan dalam konteks yang luas. Hal tersebut sesuai dengan hakikat pembangunan dalam masyarakat desa yang seharusnya lebih diperhatikan. Kartohadikusumo (1965) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal satu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat. Pembangunan masyarakat sebagai

pembangunan sosial dan ekonomi yang luas merupakan proses organisasi dan pendidikan, dimana inisiatif sukarela diidentifikasi menurut emosi orang, berkembang karah pencapaian pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi secara utuh dan perubahan kualitas pribadi baik dalam sikap maupun hubungannya dengan yang lain. Semua hal tersebut berawal dari masyarakat desa hingga tingkat nasional, melalui usaha mereka sendiri. Selain itu juga dibantu oleh iuran – iuran dalam bentuk uang maupun tenaga kerja, juga dibantu oleh pemerintah berupa pelayanan teknis di dalam keseluruhan kerangka kerja program organisasi dan rencana nasional.

Berkaitan dengan pembangunan desa, perlu disoroti pendapat Bryan dan White (1986) yang dikutip dalam Soeprapto (1987: 43) yang menyatakan bahwa peran mendasar administrator pembangunan pedesaan adalah menyeleksi proses organisasi yang paling cocok untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Seorang administrator sebenarnya dapat memilih cara pendekatan diatas yang efisien dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena segala sesuatu disampaikan secara langsung. Kemungkinan lain dia juga dapat memilih satu pendekatan yang mengarah kepada penngerakan peningkatan produksi lebih banyak dengan memperhatikan strategi dari bawah yang partisipatif. Pengelolaan pembangunan semisal pada tingkat desa merupakan proses yang inovatif, kreatif, dan responsif yang akan senantiasa mencakup berlangsungnya kegiatan belajar dan adaptasi. Dalam prakteknya, seluruh proses pembangunan adalah proses adaptasi dan belajar. Disini pulalah dituntut peranan penuh administrator dalam pembangunan.

Selain itu, konsep pembangunan desa yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pembangunan desa haruslah ditujukan pada terciptanya pembangunan yang berlanjut (*self sustained development*). Pembangunan sumber daya manusia dan pembinaan kapasitas kelembagaan melalui strategi pemberdayaan haruslah menjadi prioritas utama. Disamping itu asas comparative advantages perlu diterapkan dalam menentukan kegiatan ekonomi oleh masyarakat dan kegiatan ekonomi rakyat akan dapat distimulir. Hal lain yang harus menjadi perhatian, bahwa perencanaan pembangunan desa haruslah ditujukan kepada upaya menghilangkan atau memperkecil perbedaan faktor bagi kegiatan pembangunan desa. Peranan pemerintah pada tahap-tahap awal pembangunan desa haruslah cukup besar terutama untuk mengadakan social overhead capital dan menciptakan iklim bagi perkembangan selanjutnya. Dalam menciptakan iklim yang kondusif, pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan bagi pihak swasta agar mereka tertarik untuk berpartisipasi mengembangkan desa tersebut, seperti keringanan pajak, kemudahan memperoleh lahan, fasilitas kredit, kemudahan memperoleh ijin dan sebagainya.

Lebih lanjutnya pembangunan desa pada dasarnya dimaksudkan dalam memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan melalui program-program yang berskala besar seperti pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan pendapatn di perdesaan. Program-program ini jarang sekali dirancang dari sudut keoentingan penduduk yang dilayani dan terlalu sedikit peluang yang tersedia bagi masyarakat setempat untuk menagmbil bagian atau untuk berprakarsa dalam rancang isi program-program yang dimaksud. Asumsi

mendasar pendekatan ini adalah bahwa orang-orang miskin bodoh, tidak mampu menentukan sesungguhnya apa yang mereka butuhkan.

Dengan demikian diharapkan pembangunan desa bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan materiil tetapi juga lebih penting adalah pembangunan manusia seutuhnya. Membangun mental masyarakat merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan waktu. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan pola pikir, sikap terhadap nilai, norma-norma maupun perubahan orientasi masa lampau ke masa nyata dan rasional dalam melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencari sasaran pembangunan.

Demikian konsep pembangunan desa tersebut erat kaitannya dengan aspek partisipasi masyarakat. Demi tercapainya tujuan pembangunan desa tentunya masyarakat menjadi salah satu aktor yang harus berperan aktif membantu dalam pembangunan desa. Secara umum partisipasi dapat dikatakan keterlibatan aktif dalam melaksanakan suatu proses yang berkesinambungan demi menuai hasil yang memuaskan. Menurut Keith Davis yang dikutip dalam Sastropoetro (1986:13) tentang *human relations at work* mengemukakan definisinya sebagai berikut:

“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them” (Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan).

Pernyataan diatas dapat dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yang harus memiliki kemampuan berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dalam ruang lingkup yang luas. Partisipasi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan

bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil. Selain itu, perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan lagi tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Sehingga dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi factor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal demikian pulapencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengangguran-pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Desa Landungsari merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerintah desa Landungsari membuat dan menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan desanya. Dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan desa tersebut, salah satunya adalah dengan membangun sebuah pasar

desa. Pasar desa tersebut merupakan sebuah produk desa Landungsari yang dibangun dalam rangka mewujudkan pembangunan desa. Berdirinya Pasar desa Landungsari merupakan salah satu bentuk pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah desa setempat demi terwujudnya pertumbuhan dan perubahan dalam segi sosial masyarakat maupun ekonomi masyarakat Landungsari. Dengan berdirinya Pasar Landungsari harapannya dapat menjadi wadah bagi masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi desanya dimana masyarakat dapat menjual belikan hasil pertanian maupun ternak di Pasar Landungsari. Demikian melalui Pasar Landungsari, pemerintah setempat dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Desa Landungsari.

Landasan hukum terbentuknya Pasar Desa Landungsari adalah Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan Desa Landungsari. Pada perdes tersebut pengertian dan pengelolaan pasar telah dijabarkan pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi; Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola BUMDes Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Landungsari No 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari tersebut dikatakan bahwa Pasar Landungsari dikelola oleh Pemerintah Landungsari melalui BUMDes. BUMDes

(Badan Usaha Milik Desa) adalah suatu badan yang dibentuk sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bagi penduduk sekitar. Sebagaimana yang tertuang dalam Perdes Landungsari No 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa”. Maka untuk meningkatkan perekonomian desa, pemerintah Desa Landungsari membentuk sebuah pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan perekonomian yang dimiliki masyarakat desa dan pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes.

BUMDes Landungsari memiliki kendali atas pertumbuhan pasar desa mulai dari perumusan hingga pelaksanaan. Tentunya jika hal tersebut mengacu pada Perdes Landungsari No 4 tahun 2010 yang diterangkan pada pasal 1 ayat 14 diatas. Penyelenggaraan pasar Desa Landungsari lebih menekankan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Harapannya masyarakat sekitar Desa Landungsari dapat berpartisipasi dan meningkatkan perekonomian dengan adanya pasar desa. Namun hal ini tidak sesuai dikarenakan tidak sinkronnya peraturan desa tentang BUMDes. Pada dasarnya BUMDes Desa Landungsari mengatur tentang pasar desa karena mempunyai *output* yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Namun, kenyataannya BUMdes Desa Landugsari tidak terlalu berperan didalamnya. Hal tersebut dikarenakan pembentukan panitia dari kepala desa dan perangkat desa yang perannya menggantikan BUMDes.

Panitia Pengelola Pasar telah menentukan beberapa regulasi terkait tata tertib yang ditujukan bagi para *user* atau para penyewa kios di Pasar Landungsari.

Dalam hal ini komposisi pengelolaan pasar Landungsari seluruhnya dipegang oleh Panitia Pengelola Pasar Landungsari dan tidak ada keikutsertaan BUMDes di dalamnya. Padahal, sesuai dengan peraturan Desa Landungsari nomor 2 tahun 2008 tentang pembentukan BUMDes menjelaskan BUMDes adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa. Pergeseran peran diatas membuat BUMDes di Desa Landungsari lebih menekankan kearah produk yang lain. BUMDes Landungsari memiliki beberapa produk yang bersumber dari potensi desa. Dalam hal ini Pasar Landungsari bukan bagian dari salah satu produk milik BUMDes. Pengelolaan Pasar Landungsari diserahkan kepada sebuah panitia yang dibentuk khusus sebagai pengelola Pasar Landungsari. Memang pada saat perumusan Pasar Desa, semua elemen yang ada di Desa Landungsari dilibatkan tak terkecuali BUMDes. Tapi dalam perjalanannya BUMDes tidak terlibat dalam pengelolaan Pasar Landungsari. Pasar Landungsari lebih diatur oleh panitia pembentukan Pasar Desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. yaitu perangkat desa dan sebagian kecil masyarakat landungsari. Sehingga dapat dikatakan mekanisme pengelolaan pasar Desa Landungsari berada dalam panitia pengelola pasar dengan wewenang kepala desa.

Dalam perjalanannya pun Pasar Desa Landungsari memiliki problem yang cukup serius. Dimana pasar yang seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan tidak banyaknya penjual yang mau menaruh dagangannya di kios-kios pasar yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Mereka lebih memilih menjual dagangannya

dengan berkeliling desa atau dari rumah ke rumah menggunakan kendaraan baik motor, mobil bak, maupun gerobak. Sedangkan di pasar yang disediakan oleh Pemerintah Desa sendiri, total hanya ada 10 pedagang saja yang menempati kios-kios terletak paling depan dari sekian banyak kios yang disediakan oleh pemerintah desa. Dari permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana sistem pengelolaan diterapkan oleh pemerintah Desa Landungsari melalui Panitia Pengelola Pasar yang menggantikan peran BUMDes dalam pengelolaan Pasar Desa dengan judul **“Pengelolaan Pasar Desa Berbasis Pembangunan Partisipatif”** (Studi Kasus pada Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Pasar Desa Landungsari berbasis pembangunan partisipatif?
2. Apa faktor penghambat bagi Pemerintah Desa Landungsari dalam pengelolaan pasar desa berbasis pembangunan partisipatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan pasar desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang berbasis pembangunan partisipatif pada saat ini.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dari strategi pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam pengelolaan pasar desa berbasis pembangunan partisipatif.

D. Kontribusi Penelitian

1. Praktik

Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Akademis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar beserta pihak yang terkait mengenai strategi dalam pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana.
- b. Diharapkan pula hasil penelitian ini berguna sebagai referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang mendalam

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penulisan. Di bawah ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Mengemukakan tentang beberapa konsep atau teori temuan-temuan dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, instrument penelitian, dan di akhiri dengan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah; dan *good governance*.

Schneider mengatakan bahwa teori adalah cara terpendek untuk mengatakan sesuatu yang penting. Dunia pengalaman dan pengamatan yang penuh chaos, kesemrawutan, diabstraksikan menjadi pola-pola keteraturan dan keajegan-keajegan dengan cara memberikan ekspresi simbiolik dan hubungan logis. Sedangkan Grififths (1995:28) menyatakan bahwa: "A theory is essentially As

of assumptions from which a set of empirical laws (principles) may be derived. A theory is not law. A theory itself can not be proved by direct exprementation.”

Dengan rumus lain dikemukakan bahwa teori pada hakikatnya merupakan serangkaian asumsi, yang dari asumsi tersebut dapat diderivasikan serangkaian hokum-hukum empiric. Teori itu sendiri bukanlah hukum. Dan teori itu sendiri tak dapat dibuktikan melalui eksperimen langsung.

Dua definisi tentang teori tersebut mempunyai makna yang hamper sama walaupun didekati dengan cara pandang yang berbeda. Schneider melihat lahirnya teori dari hal-hal yang bersifat empiric, kemudian diciptakan atau dilahirkan suatu alat yang disebut teori. Sedangkan Griffiths melihat dari sisi yang abstrak. Sebenarnya lahirnya teori itu lebih tepat jika dipandang sebagai alur melingkar daripada alur linier, sehingga pendekatan apapun yang dipakai akan menghasilkan keluaran yang sama. Pendekatan Griffith lebih bersifat deduktif, sedangkan pendekatan Schneider bersifat Induktif. Sejalan dengan hal tersebut Van dyke yang dikutip oleh Rahman Zainuddin (1990) dengan tegas menyatakan bahwa *The World theory is full of ambiguity*. Lebih lanjut dikatakan bahwa dilihat dari sudut makna teori mempunyai lebih dari satu pengertian misalnya pemikiran (*thought*), dugaan (*conjectures*) atau juga gagasan.

Apapun makna yang melekat atau dilekatkan pada teori oleh para penganjurnya, teori berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan gejala atau fenomena. Fenomena yang semrawut dapat dijelaskan, disederhanakan dan dipecahkan oleh teori. Dengan demikian maka teori itu sebenarnya dibangun berdasarkan fakta. Sebaliknya praktik administrasi harus juga didasarkan pada

teori. Terjadilah hubungan simbiosis mutualistic yang baik. Karenanya maka sebenarnya pertentangan antara teori dan praktek tidaklah relevan lagi. Teori dibangun berdasarkan fakta dan praktik harus berdasarkan pada teori. Menurut Zauhar dan Indradi, (1983) lingkungan ilmu administrasi, teori administrasi berfungsi sebagai :

- (1) Pedoman untuk bertindak ;
- (2) Pedoman untuk mengumpulkan fakta ;
- (3) Pedoman untuk memperoleh pengalaman baru ;
- (4) Pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat administrasi

Arti pentingnya teori dikemukakan pula oleh Mufiz. Dia berpendapat bahwa ada 5 (lima) sebab kenapa teori administrasi public penting. Kelima sebab itu meliputi :

- (1) Teori administrasi public menyatakan sesuatu yang bermakna, yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan yang nyata.
- (2) Teori administrasi dapat menyajikan suatu perspektif.
- (3) Teori administrasi mengarah lahirnya cara-cara baru dalam hal-hal yang berbeda.
- (4) Teori administrasi yang telah ada dapat merupakan dasar untuk mengembangkan teori administrasi lainnya.
- (5) Teori administrasi membantu penggunaannya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya (Mufiz, 1984 :50)

Demikianlah apabila kita menghadapi berbagai macam problema, apakah problema untuk dipecahkan secara praktis, problema pengumpulan fakta atau problema didalam mengembangkan pengetahuan administrasi, teori akan banyak berbicara. Kegunaan atau fungsi teori administrasi yang beraneka ragam itulah yang menyebabkan beranekaragamnya teori administrasi dan bervariasinya teori administrasi. Variasi ini muncul disamping sebab seperti dipaparkan di atas,

disebabkan pula oleh perbedaan visi pencetusnya dan perbedaan kondisi yang dihadapi oleh administrasi itu sendiri.

B. Administrasi Pembangunan

1. Perencanaan dan Administrasi Pembangunan

Banyak negara-negara mempunyai rencana-rencana pembangunan yang penyusunannya lebih merupakan suatu dokumen politik tentang keinginan-keinginan dan harapan-harapan (*intention*). Bahkan hanya berupa rumusan tentang cita-cita (*to keep the ideals alive*) sehingga dengan demikian kurang memungkinkan pelaksanaannya. Berbagai rencana yang disusun secara teknis baik tetapi karena disusun oleh para ahli-ahli tanpa komunikasi yang cukup dengan elite politik, tidak mendapat dukungan politik. Kecuali itu instabilitas terutama di bidang politik banyak negara-negara baru berkembang sering kali menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sehat.

Namun demikian suatu perencanaan pembangunan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan perencanaan. Dan untuk lebih memungkinkan keberhasilan rencana tersebut, perlu terdapat hubungan yang erat antara perencanaan pembangunan dengan penyempurnaan administrasi negara. Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1995:32) mengatakan:

Hence neither public administration nor administrative reform should be an end in itself . . . clearly, new initiatives are required to bring planned development and public administration together . . . planning and administrative reform not only must be directed to the same end, but must be carried on side by side in the continuous process that is planned development.

Kecuali itu perkembangan di dalam praktek dan ilmu perencanaan menyatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi

rencana dan implementasinya. Perencanaan merupakan awal mula dari proses administrasi dalam administrasi pembangunan. Suatu rencana adalah *design* daripada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan potensi sumber-sumber secara sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu tertentu. Hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses administrasi.

Dengan uraian ini mungkin judul perencanaan pembangunan menjadi kurang tepat. Namun untuk lebih lanjut lebih memberikan penekanan terhadap hubungan yang erat antara keduanya dipakai judul tersebut. Kedua-duanya merupakan bagian dari satu proses, yaitu perencanaan atau administrasi pembangunan. Proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk menetralsisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Penekanan mengenai kaitan antara perencanaan dan administrasi pembangunan itu diberikan justru terdapatnya kenyataan adanya “*gap*” antara janjinya rencana dan realisasi pelaksanaan rencana (*gap between plan promise and plan performance*). Dan ini disebabkan oleh karena:

1. Kemampuan sistem administrasi untuk pelaksanaan yang efektif dari suatu pembangunan berencana (atau rencana pembangunan) tidak mendapat perhatian dari dalam perencanaan pembangunan. Kebutuhan-kebutuhan administratif, dan kemungkinan-kemungkinan administratif mendapat perhatian yang kurang. Demikian pula dalam perencanaan komponen administratif misalnya perencanaan dalam proyek-proyek, serta penetapan

sasaran-sasaran pembangunan kurang diperhitungkan kapasitas administratifnya.

2. Seringkali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan. Ia tidak dikaitkan untuk keperluan dan kebutuhan pelaksanaan usaha pembangunan berbagai bidang kehidupan (terutama ekonomi) yang direncanakan.

Tentang hal yang ke-2 tersebut mungkin disebabkan pula oleh karena pendekatan tradisional dari pada administrasi negara yang lebih diperhatikan, tertib administrasi dalam rangka “memerintah” dan tertib pelaksanaan hukum (*law and order*). UNESCO dalam “*The Planning of Administrative Development*” yang dikutip Tjokroamidjojo (1995:33) menyatakan:

Possibly this is, in part, a survival of a traditionalist approach to public administration, which conceived of ‘administration’ as a ‘thing apart’ carrying out function of an elitist nature related to the tasks of ‘governing’ and not concerned with the task of managing economic and social growth.

Dalam suatu tulisan lain maka hubungan yang disebutkan terdahulu itu bahkan harus dilihat dalam rangka hubungan antara pertumbuhan social ekonomi dan pembangunan administrasi. Dengan ini ternyata pula memang bahwa rencana formil bias menjadi penting, tetapi tidak selalu menjamin terdapatnya pertumbuhan social ekonomi. Namun demikian pembangunan administrasi harus tetap dikaitkan dan disesuaikan dengan perkembangan social ekonomi sebagai hasil daripada

pembangunan nasional secara berencana. Ibid dalam Tjokroamidjojo (1995:34) mengatakan:

... the close link which exists between the state fo administrative developments of a society and the pace of its social and economic growth.

Semua uraian tersebut menunjukan, bahwa dalam perencanaan pembangunan bahkan dalam keputusan-keputusan investasi pemerintah perhatian terhadap kapasitas pelaksanaan administrasi perlu dipertimbangkan rencana implementasi dari pada perencanaan tersebut perlu di integrasikan didalam perencanaan pembangunan. Usaha tersebut dilakukan dengan menyusun suatu rencana perbaikan dan penyempurnaan administrasi.

Administrasi pembangunan dengan demikian juga kemampuan administrasi untuk mendisain suatu rencana pembangunan yang efektif sebagai salah satu tugas pembangunan pemerintah. Kemudian administrasi pembangunan berarti kemampuan untuk mendisain penyempurnaan administrasi bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Mengenai desain perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisir tujuan-tujuan pembangunan (seperti yang direncanakan) akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Perlu diberi perhatian bahwa dalam perencanaan itu sendiri sebaiknya sudah terkandung kemungkinan-kemungkinan oprasionil. Untuk itu telah dikembangkan perencanaan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaannya.

Dalam perubahan-perubahan sosial yang dikembangkan secara sadar menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik oleh suatu masyarakat tertentu dikemudian hari (*induced social change*) maka perlulah perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1995:39) yang mempunyai dimensi-dimensi oprasionil tersebut adalah:

1. Berorientasi pada suatu tujuan. Tujuan dapat berupa ekonomi, politik, sosial bahkan tujuan-tujuan ideologis atau suatu kombinasi antara berbagai hal tersebut.. . tujuan-tujuan ini yang menjadi dasar dan perangsang dari kegiatan usaha yang menimbulkan “*sense of purpose*”.
2. Berorientasi pada pelaksanaannya. Perencanaan bukan hanya merumuskan tetapi diarahkan untuk merealisasikannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan dalam perencanaan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. Kemudian perlu dipikirkan pula konsekuensi dari kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih di inginkan. Sehingga ada skala prioritas pencapaian tujuan-tujuan dalam waktu. Demikian pula pemilihan cara-cara untuk merealisasikannya. Menyerasikan kombinasi yang terbaik mengenai tujuan mana yang akan dicapai dan cara apa yang dapat mencapainya dalam tahap-tahap waktu tertentu.
4. Perspektif waktu. Pencapaian tujuan-tujuan tertentu mungkin perlu di laksanakan secara bertahap. Penetapan mana yang harus didahulukan, penjadwalan kegiatan-kegiatan dan lain-lain.

5. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Dalam proses tersebut sering diperlukan reformulasi dan perencanaan kembali dari rencana.

Dalam perkembangan di bidang perencanaan pembangunan terdapat pula kecenderungan untuk lebih berorientasi pada pelaksanaannya. Mengenai hal ini dengan segera muncul kaitan yang erat antara administrasi pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Karena dengan itu perhatian diberikan lebih besar kepada segi-segi administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan dalam perencanaan pembangunan terutama perencanaan ekonomi akhir-akhir ini adalah bahwa tidak saja dikembangkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik perencanaan yang lebih maju, tetapi dalam teknik-teknik dan prinsip-prinsip itu juga diperhatikan aspek pelaksanaan rencana (*plan implementation*). Didalam perencanaan terdapat kecenderungan yang berorientasi pada masalah-masalah administrasi. Dengan demikian pendekatan administrasi pembangunan dalam banyak hal serasi dengan tinjauan terhadap aspek administrasi dalam rencana pembangunan.

2. Penyempurnaan Administrasi untuk Pelaksanaan Pembangunan

Salah satu hambatan pokok terhadap kemampuan administrasi negara untuk mendukung tugas-tugas baru dalam pelaksanaan pembangunan adalah karena seringkali birokrasi pemerintah itu sendiri sebagai produk dari pada lingkungannya yang masih terbelakang. Yaitu karena berbagai cirri-ciri yang melekat padanya seperti: kemampuan pelaksanaan lebih ditujukan pada segi “memerintah”, dan menjamin tertib pelaksanaan hukum. Sikap yang legalistis dalam pemecahan

masalah dan tidak inovatif. Orientasi terhadap senioritas dan status, dan masih terdapat banyak peternalisme dan “*spoil system*” dalam administrasi kepegawaian. Proses pembangunan berencana pada dirinya merupakan pula suatu dukungan terhadap kemungkinan penyempurnaan administrasi negara. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan: 1. Usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh; 2. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi yang dilakukan secara sebagian-sebagian.

Pada cara pendekatan yang kedua ditekankan perbaikan dan penyempurnaan pada bidang yang strategis, yang kemudian diharapkan bias berkembang dan memperluas kepada bidang penyempurnaan administrasi negara lainnya. Ini sering disebut sebagai “*nuclea approach*” dan oleh Siagian (1972:137:138) disebut sebagai “*island approach*”. Pendekatan ini antara lain di kemukakan oleh Waterson (1965:8):

Rather, the view advanced here is that partial improvement in public administration need not be haphazard, piece-meal and ineffectual; if carefully conceived and planned, they can produce substantial immediate result in dealing with urgent problem and, in addition, lay a basis for overall administrative reform later

Pada umumnya cenderung dilakukan suatu perencanaan perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dilihat secara menyeluruh dalam dimensi waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan pula antara lain karena tingkat kematangan suatu administrasi negara memang memerlukan jangka waktu panjang. Tetapi pelaksanaannya dilakukan sebagian-sebagian sesuai dengan prioritasnya.

Dengan demikian administrasi negara dengan pendekatan “*nucla-nuclea*” dilaksanakan dalam rangka suatu perencanaan penyempurnaan yang bersifat luas.

Dalam cara pendekatan sebagian-sebagian tersebut, dikembangkan dalam administrasi pembangunan gagasan tersebut didasarkan kepada suatu asumsi bahwa gerak pembaruan dan pembangunan yang lebih luas perlu dimulai dan kemudian perlu dikembangkan melalui suatu institusi pembaharu.

Demikian pula administrasi negara harus menghadapi tuntutan-tuntutan sebagai akibat proses pembangunan itu sendiri yang dihadapi banyak negara seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, laju pertumbuhan industri dan urbanisasi, pembangunan dalam bidang pertanian, masalah lingkungan hidup, bertambahnya pengangguran dan ketegangan-ketegangan social, dan lain sebagainya. Pembangunan berarti pula menangani kasus-kasus yang khas yang merupakan kelemahan dan perlu dibina ataupun kelemahan-kelemahan sebagai hasil sampingan dari pada pembangunan. Perhatian perlu diberikan pula pada kenyataan bahwa pembangunan yang terlaksanan di berbagai negara masih menunjukan kurang wajarnya penyebaran hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Penyempurnaan administrasi harus dilakukan pula didalam suatu keadaan perubahan sikap, nilai, dan institusi. Tetapi sebaliknya penyempurnaan administrasi dapat mempengaruhi perubahan sikap-sikap dan nilai-nilai. Contohnya suatu introduksi dari sistim kepegawaian berdasarkan prestasi sering kali berarti penggantian dari hubungan kekeluargaan tradisional, struktur sosial, nilai dan kepentingan politik, dengan nilai-nilai dan norma-norma berdasar efisiensi dan efektifitas tidak memihak. Salah satu hal lain yang menjadi tantangan perhatian administrasi negara adalah usaha bahwa

pembangunan baru dapat berhasil secara memuaskan apabila terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu. Tentu saja hal ini sesuai dengan situasi khusus lingkungan masing-masing negara.

C. Teori Pembangunan

1. Pembangunan

Menurut Tjokroamidjodjo (1995:222) berpendapat “Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Sedangkan Siagian (2007:6) mengemukakan pembangunan sebagai berikut: “Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)”.

Sedangkan definisi pembangunan menurut Sudriamunawar (2006:89): “Bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan social yang berlangsung terus-menerus kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara”. Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada

modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan. Dari definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses;
2. Pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dalam suatu proses pembaharuan yang dilaksanakan secara continue;
3. Rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan dengan suatu rencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah;
4. Pembangunan yang dilaksanakan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai disini bersifat multidimensional yang mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan pada pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantab keberadaannya;

Hal senada juga disampaikan oleh Tjokrowinoto sebagaimana dikutip oleh Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif *diakronis* (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan social menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses social yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh konsep *transcendental*, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmenttalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*.

Sehingga didalam melaksanakan pembangunan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi kelancaran dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*), pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan lebih efisien agar masyarakat nantinya dapat dilibatkan dalam menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu pemimpin yang bijaksana (*leadership*), karena berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin dan diharapkan agar seorang pemimpin dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Ketiga, yaitu partisipasi masyarakat (*people participation*), dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, social, budaya dan lain-lain, baru akan berhasil apabila didalam pelaksanaannya ikut melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk

berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu, organisasi-organisasi kemasyarakatan (*community organization*) seperti gotong royong, permusyawaratan dan lain-lain yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, perlu diperiksa sesame untuk akhirnya nilai-nilai positif dari intuisi itu dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional umumnya (Suryono, 2004:106)

2. Perkembangan Paradigma Pembangunan

Pada awalnya pembangunan nasional yang dilaksanakan diberbagai Negara berkembang, pada dasarnya ditekankan pada pembangunan ekonomi, yaitu perubahan ekonomi kearah yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena hal yang paling terasa yang dapat dibandingkan antara Negara maju dengan Negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi. Didasarkan pada asumsi bahwa dengan melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi, maka dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan di bidang yang lain. Namun sejalan dengan berkembangnya jaman, perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja tidak sudah diakui tidak memberikan jaminan suatu proses pembangunan nasional akan dapat berjalan stabil dan continue.

Sebagai salah satu tujuan dari setiap Negara-negara berkembang adalah komitmen dan orientasi terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Pembangunan yang dilaksanakan setiap Negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil mengenai landasan filsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijakan dan program-program pembangunannya. Namun demikian pembanunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses

kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa perkembangan paradigma pembangunan pada tahun 60-an menerapkan konsep pembangunan yang disebut paradigm pertumbuhan (*growth paradigm*) yang menekankan peningkatan pendapatan masyarakat pertumbuhan pendapatan nasional. Pada paradigma ini pembangunan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Gunnar Mirdal yang telah dikutip oleh Supriatna (2000:14), bahwa : “Untuk mengejar ketertinggalan pada Negara berkembang digunakan konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), dengan ditandai pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) yang didukung kebijakan investasi, transfer teknologi, dan perdagangan untuk industrialisasi”. Namun dalam kenyataannya dalam konsep paradigma pertumbuhan ini sasaran yang ingin dicapai kurang mengenai sasaran sebagaimana yang diharapkan, atau tidak menguntungkan sekelompok masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dudley seers yang dikutip oleh supriatna (2000:15) yang mengatakan bahwa “Konsep paradigm pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi sasaran, oleh karena penerapan strategi pembangunan ekonomi pada Negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembagian pendapatan”.

Penerapan konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan membuat semakin kuatnya ketergantungan Negara berkembang pada Negara maju, yang berupa pola konsumsi, investasi, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Memang

hasilnya dapat dirasakan, tetapi ternyata dapat dikhawatirkan terjadi pengurasan Sumber Daya Manusia yang mengancam kelangsungan pembangunan.

Oleh karena itu pada tahun 70-an dan 80-an muncul konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan (*growth equity*), dengan tujuan pemerataan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, usaha, keamanan, kesejahteraan social maupun kelestarian lingkungan yditandai oleh struktur perubahan ekonomi dan sosial. Strategi didasarkan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi Sumber Daya Manusia dan pembangunan social dalam proses pembangunan. Model ini merupakan suatu langkah maju dalam memberikan pertimbangan pada aspek pembangunan manusia jika dibandingkan dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan.

Kemudian pada tahun 80-an sampai 90-an dengan strategi dasawarsa pembangunan PBB ketiga sebagai tanda perbaikan social ekonomi di negara-negara berkembang dengan sasaran utama yang menjadi perhatian serius adalah pertumbuhan pendidikan, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi dan organisasi social atau politik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat pedesaan.

Dalam dekade ini ditandai adanya masalah kependudukan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan alam akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada pembangunan nasional, sehingga dapat berpengaruh pada keadilan, kelangsungan, dan integritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian sebagai konsekuensi dari persoalan tersebut diterapkan konsep paradigm pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia atau *human development* dan juga konsep

pembangunan bangsa (*national building*) yang merupakan salah satu aspek dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan social yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja melainkan juga pembangunan dibidang politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar bangsa.

Di Indonesia sebagai Negara berkembang menganut konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh yang menempatkan manusia sebagai pribadi, mahluk social, dan religious, sehingga arah pembangunan kearah “Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dengan mengusahakan pembangunan fisik dan non fisik serta kesejahteraan (Supriatna, 2007:17).

Konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan system nilai, gerakan, metode, strategi, dan indicator yang menjadi domain setiap Negara berkembang. Pembangunan sebagai sebuah system mencakup komponen masukan, terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya dan kelembagaan masyarakat; komponen proses, terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan; dan komponen keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa perspektif baru pembangunan tersebut memberikan peranan yang khusus pada kebijakan Negara yang perlu dan harus dikembangkan

upaya untuk menumbuh kembangkan daya kreatif masyarakat itu sendiri agar membangun dirinya kearah peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut menurut David Korten sebagaimana dikutip oleh Suryono (2004:107) mengatakan bahwa karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat diitingkat local;
- b. Focus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan asset-aset untuk memenuhi kebutuhan menurut daerahnya;
- c. Toleransi terhadap perbedaan;
- d. Proses pembelajaran social (*social learning*) yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai dengan mengatur evaluasi proyek;
- e. Budaya kelembagaan yang ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi;
- f. Proses pembentukan Jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan LSM local, satuan organisasi tradisional mandiri;

Dari pendekatan diatas dapat dilihat bahwa program pembangunan jenis apapun yang akan dilaksanakan di desa, masyarakat diharapkan untuk ikut anduntur serta secara aktif, baik dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan bahkan monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut masyarakat akan merasa puas dan bertanggung jawab serta memperoleh perasaan memiliki program pembangunan tersebut, dan diharapkan agar pembangunana desa dapat berhasil apabila masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan berbagai program

pembangunan dan tidak hanya bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, kekuatan, disiplin para penyelenggara Negara.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan secara umum. Keterkaitan ini memiliki fungsi dalam proses di dalamnya yang berkesinambungan untuk membuahkan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Sesuai dalam hakikat konsep pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan memang diarahkan untuk mencapai kemajuan lahiriah dan kemajuan batiniah bagi seluruh masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun desa. Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat, memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Menurut Bintarto (1977) yang dikutip dalam Mubyarto (1988:57) desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan

pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa berkaitan sekali dengan pembangunan dalam konteks yang luas. Hal tersebut sesuai dengan hakikat pembangunan dalam masyarakat desa yang seharusnya lebih diperhatikan.

Kartohadikusumo, (1965) desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Desa juga memiliki wilayah yang umumnya jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri seperti, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan, cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Pembangunan masyarakat sebagai pembangunan sosial dan ekonomi yang luas merupakan proses organisasi dan pendidikan, dimana inisiatif sukarela diidentifikasi menurut emosi orang, berkembang kearah pencapaian pengembangan budaya, sosial dan ekonomi secara utuh dan perubahan kualitas pribadi baik dalam sikap maupun hubungannya dengan yang lain. Semuanya itu berawal dari tingkat masyarakat desa hingga tingkat nasional, melalui usaha mereka sendiri. Selain itu juga dibantu oleh iuran-iuran dalam bentuk uang maupun tenaga kerja, juga dibantu oleh pemerintah berupa pelayanan teknis didalam keseluruhan kerangka kerja program organisasi dan rencana nasional.

Berkaitan dengan pembangunan desa, perlu disoroti pendapat Bryan dan white (1987) yang dikutip dalam Sastropetro (1986:43) yang menyatakan bahwa

Peran mendasar administrator pembangunan perdesaan adalah menyeleksi proses dan organisasi yang paling cocok untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Seorang administrator sebenarnya dapat memilih cara pendekatan diatas yang lebih efisien dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena segala sesuatu disampaikan secara langsung. Kemungkinan lain dia juga dapat memilih suatu pendekatan yang mengarah pada penggerakan peningkatan produksi dengan lebih banyak memperhatikan strategi dari bawah yang partisipatif. Pengelolaan pembangunan (semisal pada tingkat desa) merupakan proses yang inovatif, kreatif dan responsif yang akan senantiasa mencakup berlangsungnya kegiatan belajar dan adaptasi. Dalam prakteknya, seluruh proses pembangunan adalah proses adaptasi dan belajar. Disini pulalah dituntut peranan penuh administrator dalam pembangunan.

Selain itu, konsep pembangunan desa yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pembangunan desa haruslah ditujukan pada terciptanya pembangunan yang berlanjut (*self sustained development*). Pembangunan sumber daya manusia dan pembinaan kapasitas kelembagaan melalui strategi pemberdayaan haruslah menjadi prioritas utama. Disamping itu asas *comparative advantages* perlu diterapkan dalam menentukan kegiatan ekonomi oleh masyarakat dan kegiatan ekonomi rakyat akan dapat distimulir. Hal lain yang harus menjadi perhatian, bahwa perencanaan pembangunan desa haruslah ditujukan kepada upaya menghilangkan atau memperkecil perbedaan faktor bagi kegiatan pembangunan desa. Peranan pemerintah pada tahap-tahap awal pembangunan desa haruslah cukup besar terutama untuk mengadakan *social overhead capital* dan menciptakan iklim bagi perkembangan selanjutnya. Dalam menciptakan iklim yang kondusif, pemerintah

perlu memberikan berbagai kemudahan bagi pihak swasta agar mereka tertarik untuk berpartisipasi mengembangkan desa tersebut, seperti keringanan pajak, kemudahan memperoleh lahan, fasilitas kredit, kemudahan memperoleh izin dan sebagainya.

Lebih lanjutnya pembangunan desa pada dasarnya dimaksudkan dalam memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan melalui program-program yang berskala besar seperti pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan pendapatan di perdesaan. Program-program ini jarang sekali dirancang dari sudut kepentingan penduduk yang dilayani dan terlalu sedikit peluang yang tersedia bagi masyarakat setempat untuk mengambil bagian atau untuk berprakarsa dalam rancang isi program-program yang dimaksud. Asumsi mendasar pendekatan ini adalah bahwa orang-orang miskin bodoh, tidak mampu menentukan sesungguhnya apa yang mereka butuhkan.

Dengan demikian diharapkan pembangunan desa bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan materiil tetapi juga lebih penting adalah pembangunan manusia seutuhnya. Membangun mental masyarakat merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan waktu. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan pola pikir, sikap terhadap nilai, norma-norma maupun perubahan orientasi masa lampau ke masa nyata dan rasional dalam melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencari sasaran pembangunan.

4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembangunan Desa

Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran,

sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Pembangunan desa tersebut diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (www.djpk.depkeu.go.id).

Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Herizal (2014) menjelaskan bahwa mengacu kepada rumusan Pasal 18B ayat (2) maka RUU tentang Desa memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah

diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Keberadaan desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) bahwa Desa melaksanakan fungsi pemerintahan,

baik berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki oleh Desa, maupun kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian sesuai yang dikutip dari Herizal (2014), Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government* Sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa.

Oleh sebab itu, dikutip dalam Herizal (2014) di masa depan Desa, Desa Adat atau dengan nama lain dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Undang-Undang Desa ini adalah dalam konteks pengaturan desa azas-asas yang diaktualisasikan, yaitu, rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

5. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

D. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Cropper (1998: 1) berpendapat "*Planning is the basis from which all other function are spawned. Without a congruent plan, organizations usually lack a central focus*". Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan

serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan menurut Suharsimi Arikunto, (1993: 38) meliputi:

1. Apa yang dilakukan
2. Siapa yang melakukan
3. Di mana akan melakukan

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.* Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya

adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

1. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
2. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.

2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

E. Konsep Dasar Partisipasi

1. Definisi Partisipasi

Definisi partisipasi banyak dikemukakan oleh berbagai ahli atau lembaga, namun belum ada satu kesepakatan secara pasti mengenai definisi partisipasi, sedangkan teori yang digunakan pada umumnya langsung menyangkut kepada penerapannya atau aplikasinya. Sekalipun begitu disini penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli tentang definisi partisipasi seperti yang dikutip oleh Sundriamunawar (2006:46):

1. Menurut Dirjen PMD Depdagri:
Partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.
2. Menurut Gordon Allport:
Partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari halnya jasmaniah/ fisik saja.
3. Menurut Keith Davis:
Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab.
4. Menurut Santoso S. Hamidjojo:
Partisipasi berarti: a) turut memikul beban pembangunan, b) menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya. c) terwujudnya kreatifitas dan oto aktifitas
5. Menurut Sutrisno Kutoyo:
Partisipasi adalah pengertian mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab pada organisasi yang bersangkutan.
6. Menurut Santoso Sastropetro:
Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk tujuan bersama.
7. Menurut Daryono, SH:
Partisipasi berarti keterlibatan dalam: proses pengambilan keputusan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksplotasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan.
8. Menurut Mubyarto partisipasi adalah mengenai suatu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan sesuai dengan kemampuannya tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri.
9. Menurut Departemen Pertahanan dan Keamanan RI:
Partisipasi adalah sebagai perwujudan sikap dan perilaku positif masyarakat dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar tanggung jawab bersama yang bersumber dari kesadaran.

10. Menurut Raharjo Adisasmita:

Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dan perencanaan dan pelaksanaan implementasi program/proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat local dan merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan definisi partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan atau kepentingan dan berorientasi untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapainya atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Bahkan suatu program yang tidak didukung oleh partisipasi masyarakat tidak memiliki arti apa-apa, artinya hasil pembangunan tersebut tidak akan bias dinikmati dalam waktu yang lama bahkan lebih jauh lagi hasil pembangunan itu tidak akan lestari karena tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Sehingga dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara

terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

2. Bentuk dan Jenis Partisipasi

Menurut pendapat Adisasmita (2006:53) yang mengemukakan tentang berbagai bentuk dan jenis partisipasi yang telah berkembang adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam dunia usaha.
2. Partisipasi dalam bidang sosial ekonomi seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, angkutan dan jenis jasa-jasa lain.
3. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan seperti yang dilakukan LPM dan sebagainya.
4. Partisipasi karena dorongan batin untuk turut memikirkan permasalahan pembangunan, seperti yang dilakukan oleh media massa dan sebagainya.
5. Partisipasi kelompok profesional dan kelompok minat karena ingin menyumbangkan kemampuannya kepada masyarakat yang miskin, menderita, tertinggal dan terpencil seperti yang dilakukan oleh LSM.
6. Partisipasi yang telah lama melembaga ditengah tradisi masyarakat, seperti gotong royong, banjar desa, rembug desa, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Kaho (1997:114) bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan rumusan Dirjen PMD Depdagri (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen dalam Negeri), sebagaimana yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006:51) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi disini memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok masyarakat itu turut serta menyumbangkan ide-ide bagi pembangunan masyarakat. Sebagai contoh nyata partisipasi buah pikiran dalam kehidupan di desa adalah kegiatan ajang sono, rapat desa, musyawarah maupun desa yang dilaksanakan dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

2. Partisipasi Tenaga dan Fisik

Partisipasi yang bersifat aktif yang dilakukan seorang atau masyarakat dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat desa perkembangan partisipasi tenaga dan fisik ini tampak pada pekerjaan gotong royong dalam perbaikan jalan, jembatan, rehabilitasi sarana ibadah, pendidikan dan sebagainya.

3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Partisipasi yang dilakukan oleh seorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran dan keterampilan yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan desanya. Contoh nyata dalam kehidupan masyarakat desa dapat dilihat pada perayaan kemerdekaan Negara kita, dimana masing-masing desa mengerahkan warga masyarakatnya yang memiliki kemampuan dalam seni untuk menghias dan menata desa dengan sebaik dan seindah mungkin. Mengirim warga desa yang memiliki prestasi dalam kegiatan lomba desa baik tingkat Kabupaten I Kota madya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

4. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi yang dilakukan warga masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa barang maupun benda. Hal ini biasanya dilakukan seorang bila tidak

dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan desa. Tidak bisanya untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan disebabkan karena sudah uzur, sedang sakit atau sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh dalam kehidupan masyarakat desa adalah seperti menyumbang makanan untuk masyarakat yang sedang melakukan kerja bhakti/gotong royong, memberikan sumbangan berupa makanan, minuman atau uang kepada yang melakukan ronda malam dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, maka penulis membatasi jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam mengemukakan pendapat dan pikiran

Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan pikiran dalam hubungannya dengan pembangunan desa diwujudkan dalam keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan yang berupa pendapat dan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan di desanya. Sumbangan pendapat dan pikiran tersebut dapat disalurkan melalui rapat atau musyawarah yang membahas tentang pembangunan desa. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang besar, maka hendaknya semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah pembahasan tentang pembangunan, sehingga seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat dapat ditampung dan dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga nantinya program-program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dan menyentuh kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan desa, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga

masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka, partisipasi tenaga kerja yang ada di desa disadari dengan semangat gotong-royong yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Untuk melestarikan semangat kerja seperti ini, maka sifat dan semangat gotong royong harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Partisipasi dalam bentuk *skill* atau keahlian

Partisipasi dalam bentuk *skill* atau keahlian ini diwujudkan dengan memberikan sumbangan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat desa hubungannya dengan pembangunan desa. Warga desa yang memiliki kemampuan pada bidang tertentu dapat menyumbangkan kemampuannya dalam kegiatan pembangunan desanya, seperti misalnya warga yang memiliki keahlian dibidang pertukangan. Sumbangan kemampuan mereka ini sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dengan dibantu warga desa yang lainya.

4. Partisipasi dalam bentuk sumbangan atau materiil

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk materi yang merupakan sumbangan dari semua warga desa. Sebagai contoh, misalnya disuatu desa akan dilaksanakan pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, maka warga dapat memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka, sumbangan ini bias berupa uang, bahan bangunan, makanan, dan lain-lain. Sumbangan yang dimaksud ini bersifat sukarela tidak memaksa, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga desa.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan warga desa. Seluruh warga desa harus dilibatkan keikutsertaannya dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan didesannya, tanpa terkecuali. Pembangunan disini mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang ada di desa. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di desa, sedangkan pembangunan non fisik dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dengan cara salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh warga.

6. Partisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan

Wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam memelihara semua hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua hasil pembangunan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa, dan diharapkan tidak dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

7. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan

Dalam partisipasi ini masyarakat diberikan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan, namun hendaknya didalam memberikan penilaian disertai dengan pendapat mereka sebagai masukan perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih baik dari sebelumnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1995:226), ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, antara lain:

a. Kepemimpinan

Unsur pertama dari proses pengendalian usaha dalam pembangunan ditentukan sekali oleh adanya faktor kepemimpinan serta kualitas kepemimpinan. Peranan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan politik suatu bangsa adalah amat menentukan. Bahkan sering kali menjadi penentu utama dari bias atau tidaknya proses pembangunan terselenggara. Ia yang mempunyai atau menerima gagasan-gagasan pembaharuan dan pembangunan, dan mampu berkomunikasi melalui otoritasnya untuk meyakinkan dan kemudian untuk menterjemahkan dalam pengendalian usaha menyeluruh dari pada terselenggaranya proses pembangunan tersebut. Namun demikian supaya proses pembangunan itu berjalan secara terus-menerus dan menjadi kekuatan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan banyak pembinaan dalam segi kepemimpinan ini.

Di bidang administrasi Negara sendiri, serta organisasi-organisasi yang terkait dengannya, diperlukan pemimpin-pemimpin yang mendapatkan legalitas dari kekuasaan formil (pemerintah). Kepemimpinan formil adalah kepemimpinan karena posisi dan kekuasaan legalnya, tetapi ada juga kebutuhan akan peranan pemimpin karena kepribadian dan daya persuasinya. Semua kapasitas kepemimpinan tersebut penting dilihat dari segi penggairahan dan persuasi. Tetapi untuk pelaksanaan pembangunan diperlukan kepemimpinan yang lain, yaitu tipe *manager*, *entrepreneur* dan lain-lain. Tidak saja untuk keperluan administrasi negara, tetapi juga untuk keperluan dunia usaha dalam masyarakat. Bahkan proses pembangunan itu sendiri akan memberi kecenderungan perubahan-perubahan dalam pola kepemimpinan dan proses terjadinya pemimpin pada masa lalu orang

menjadi pemimpin karena suku, daerah, keturunan atau pengetahuan agama dan lain-lain ikatan primordial. Dalam masyarakat yang berubah, sumber-sumber baru kepemimpinan terjadi karena kekayaan, kepandaian kepada suatu ilmu, kecakapan administrasi dan organisasi, dan lain-lain. Hal ini tidak mengurangi pentingnya peranan pemimpin-pemimpin informal yang mendapatkan legitimasi atau dasar-dasar ikatan-ikatan tradisional didalam masyarakat baru berkembang (periode transisi). Karena mereka dapat menjembatani komunikasi timbal balik dari atas ke bawah dan dari atas ke bawah.

Faktor kepemimpinan juga merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Pada dasarnya keberhasilan seorang pemimpin bergantung terhadap kemampuannya mempengaruhi pihak lain. Menurut pendapat Maxwell sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007:109) mengatakan bahwa “Kunci menuju sukses dalam usaha apa saja adalah kemampuan memimpin orang lain secara sukses”.

Lebih lanjut Kartono sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007:111) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “Kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang telah dicanangkan”.

Dalam kenyataannya dapat dikenal adanya beberapa model atau tipe kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang jelas berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin yang lainnya. Tipe kepemimpinan tersebut dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2003:34) yang menguraikan tipe- tipe kepemimpinan dalam lima golongan, yaitu:

a. Tipe Otokratik

Seorang pemimpin dapat dikategorikan pada tipe otokratik apabila, antara lain ia: menganggap organisasi sebagai milik pribadi; mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; menganggap bawahan sebagai alat mata-mata; tidak mau menerima kritik, saran ataupun pendapat; terlalu bergantung terhadap kekuasaan formalnya; dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan *approach* yang mengandung unsur paksaan dan *punitive* (bersifat menghukum).

b. Tipe militeristik

Perlu ditekankan dahulu bahwa yang dimaksud dengan pemimpin bertipe militeristik tidak identik dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang tergolong tipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat antara lain: dalam menggerakkan bawahannya sistem pemerintah yang sering dipergunakan; dalam menggerakkan bawahan sering bergantung pada penggunaan pangkat dan jabatannya; senang kepada formalitas berlebih-lebihan; menuntut disiplin tinggi dan kaku terhadap bawahan; sukar menerima kritikan dari bawahannya; menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

c. Tipe paternalistic

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin paternalistic adalah seorang yang: menganggap bawahannya sebagai seorang yang tidak dewasa; bersikap terlalu melindungi (*over protective*); jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif; jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasinya; sering bersikap maha tau.

d. Tipe kharismatik

Hingga sekarang para sarjana belum menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang tampak adalah pemimpin tersebut memiliki daya tarik yang amat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. karena kurangnya pengetahuan mengenai sebab-

musahab seorang menjadi pemimpin karismatik, maka sering dikatakan pemimpin tersebut memiliki kekuatan ghaib (*supranatural power*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat digunakan sebagai criteria tipe kepemimpinan karismatik. Mengenai profil, sejarah membuktikan bahwa ada pemimpin karismatik yang penampilan fisiknya mengagumkan, namun ada pula yang tidak.

e. Tipe demokratik

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratik lah yang paling tepat untuk organisasi modern karena: dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk termulia di dunia; selalu mengsingkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi para bawahannya; ia senang menerima saran, pendapat, bahkan kritikan dari bawahannya; selalu berusaha mengutamakan kerja sama (*teamwork*) dalam usaha mencapai tujuan; dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada bawahan untuk berani bertindak meskipun mungkin berakibat terhadap kesalahan yang kemudian dibimbing dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi membuat kesalahan yang sama, tetapi akan lebih berani bertindak demi masa depan; selalu berusaha menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Secara implicit tergambar bahwa untuk menjadi pimpinan tipe demokratik bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Akan tetapi pemimpin demikianlah yang paling ideal, tipe demikian itu yang perlu dikembangkan.

Dalam kaitannya dengan masyarakat desa maka pola kepemimpinan yang demokratislah yang dapat menumbuhkan sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan desa karena rakyat diberi kesempatan untuk berpendapat dan menyumbangkan pikiran di berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat tumbuh berkembang luas

dikalangan masyarakat desa. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip dan sifat bangsa Indonesia untuk selalu bermusyawarah dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan.

Untuk menumbuhkan dan menyuburkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka masalah kepemimpinan merupakan yang penting. Penerapan pola kepemimpinan yang tepat akan mempengaruhi pula partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, karena itu menjabat sebagai pemimpin di desa adalah sangat tepat kalau dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dengan sistem demikian, hasilnya akan selaras dengan inspirasi dan kehendak masyarakat itu sendiri yang menghendaki hak dan suara rakyat dalam setiap kegiatan dan rencana pembangunan desa. Makin demokratis seorang pemimpin makin besar pula kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desannya. Selain itu pemimpin yang disenangi masyarakatnya akan lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena setiap program kerjanya akan selalu didukung oleh seluruh rakyat yang memilih dia sebagai Kepala Desanya.

b. Komunikasi

Faktor lain yang ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah komunikasi. Karena gagasan-gagasan, kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan kemudian dimengerti, bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat). Kemudian diterima dengan pengertian oleh masyarakat, bahwa hasil daripada kebijakan dan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik oleh masyarakat. Komunikasi bukan hanya penerangan, biarpun penerangan merupakan suatu hal yang penting, tetapi penerangan menumbuhkan suatu iklim pengertian aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan pengembangan terhadap tujuan-tujuan yang bersifat pembangunan secara nasional. Komunikasi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai perubahan-perubahan nilai dan sikap yang inheren didalam proses pembaharuan dan pembangunan tanpa menimbulkan tekanan, frustasi dan friksi.

Komunikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih dengan cara yang tepat., sehingga pesan yang dimaksud dapat dapat dipahami; hubungan; kontak. Sedangkan menurut Thoha (2007:167) yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain.

Fungsi utama dari komunikasi pembangunan adalah memberikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Informasi yang dimaksud dapat beraneka ragam

dan bermacam-macam tergantung dari kehendak sumber informasi untuk memberikan pesan kepada penerima informasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka komunikasi tidak hanya harus datang dari atas, melainkan harus bersifat timbal balik (dua arah). Komunikasi seperti ini erat hubungannya dengan kepemimpinan dan peranan serta hubungan kepemimpinan di dalam suatu masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, maka masyarakat desa merupakan pihak penerima informasi, sedangkan pemerintah merupakan pemberi informasi pemerintah sebagai pemberi informasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat haruslah dapat dipahami oleh masyarakat secara mengena, terutama pesan-pesan pembangunan sehingga masyarakat akan tergugah untuk berpartisipasi diseluruh kegiatan pembangunan yang tengah berlangsung.

c. Pendidikan

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara, dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Bahkan pendidikan memberi prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup sebagai bangsa. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersediannya dan kualitas pendidikan.

Kecuali itu tingkat pendidikan juga berarti tingkat kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan. Didalam suatu proses yang berkembang secara dinamis, maka penyediaan dan kualitas pendidikan juga harus berkembang

sedemikian rupa untuk mendukung proses itu sendiri serta sistem dan penyelenggaraan pendidikan perlu diorientasikan bagi kepentingan pembaharuan dan pembangunan.

Dengan kemudahan pemahaman terhadap berbagai program pemerintah tersebut maka partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan akan mudah dicapai, disamping wujud keterlibatan mereka dalam pembangunan tersebut akan lebih bervariasi dan tidak hanya partisipasi tenaga saja. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka faktor pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan. Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diperoleh, karena untuk menangani semangat dan keuletan yang tangguh untuk menghadapi pembangunan desannya.

Maka oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa maka perhatian terhadap upaya peningkatan bagi masyarakat pedesaan sangatlah diperlukan, minimal rakyat pedesaan dapat bebas dari buta huruf dan buta aksara yang saat ini sudah mulai diberantas pemerintah melalui program-programnya tersebut.

4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan desa

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, perencanaan yang terperinci dan kegiatan-kegiatan yang nyata dan efektif, tetapi juga hendaknya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Salah satu ciri suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan semakin tinggi kesadarannya, serta semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Anggota masyarakat bukan lagi menjadi obyek semata dari pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan. Kedudukannya sebagai subyek pembangunan berarti anggota masyarakat harus diajak untuk berperan secara lebih aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dalam menyusun perencanaan dan dalam implementasi program/proyek. Menurut Adisasmita (2006:36), alasan atau pertimbangan mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa itu penting adalah karena:

1. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan sosial ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dimasyarakat.
3. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
4. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya.
5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Sesuai dengan pernyataan diatas Sudriamunawar (2006:57), berpendapat bahwa:

“Keberhasilan upaya pembangunan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat disekitarnya. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan secara aktif, baik secara perorangan, kelompok, ataupun dalam kesatuan masyarakat, dalam proses pembuatan keputusan bersama atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab yang diembannya.”

Terhadap partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, Tjokroamidjojo (1995:222) mengatakan ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya;
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik;
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana;

Dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat menduduki porsi yang sangat penting, menurut Dirjend PMD Depdagri (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri) sebagaimana yang dikutip oleh Sudriamunawar (2006:57) hal ini disebabkan antara lain:

1. Memiliki tujuan yang paling tidak memiliki empat macam, yaitu:
 - a. Pembangunan memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
 - b. Menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban.
 - c. Usaha swadaya.
 - d. Memupuk kesadaran untuk memelihara dan mendapatkan hasil maksimal.
2. Memiliki fungsi antara lain:
 - a. Banyak kegiatan yang dapat diselesaikan.
 - b. Mengurangi biaya.
 - c. Nilai sangat dan bermanfaat.
 - d. Rasa tanggung jawab yang tinggi.

- e. Menampung kebutuhan.
- f. Pelaksanaan cepat.
- g. Pembangunan sumber daya alam dan tenaga dapat maksimal.

Lebih lanjut Diana Conyers sebagaimana yang dikutip oleh Supriatna (2000:14) mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting, karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memparolah pinformasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek pembangunan akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mengetahui proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Adanya tanggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dari beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat ikut memengaruhi arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme dan proses politik yang berlangsung dalam suatu negara. Disamping itu masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan nyata sesuai dengan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme dan proses politik dan sistem serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

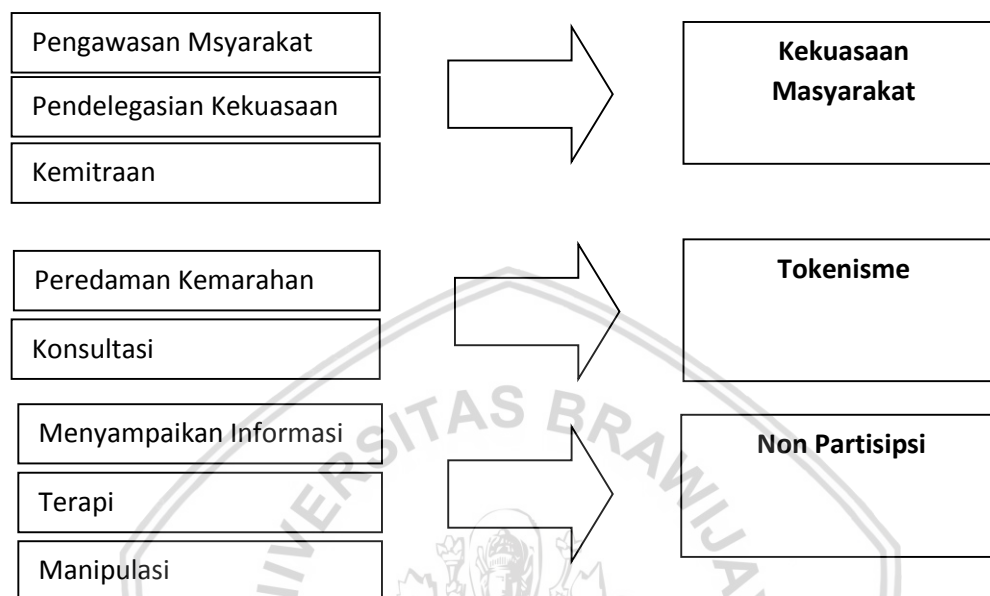
Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep partisipasi itu sendiri. Sutoro dalam bukunya Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat (2004) menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari *voice*, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut:

- a. *Voice*. Merupakan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. *Voice* dapat disampaikan warga dalam banyak cara diantaranya: opini publik, referendum, media masa, berbagai forum warga.
- b. Akses. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mempunyai persamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.
- c. Kontrol. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal (*external control*). Artinya kontrol atau pengawasan bukan saja kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, Arnstein (1969) yang dikutip dari Sumarto (2004) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar delapan tangga partisipasi Arnstein:



Gambar 1. Delapan Tangga Partisipasi Arnstein



Sumber : Sumarto (2004)

Dari deskripsi tersebut, Arnstein memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat dari tangga pertama sampai tangga ke delapan dengan logika sebagai berikut:

- a. Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Di dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi obyek dalam program.

- b. Tangga ketiga, pemberian informasi dilanjutkan tangga ke empat konsultasi dan tangga kelima peredaman kemarahan/ penentraman adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda). Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. Konsultasi yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan mengetahui keberadaan publik. Tangga kelima adalah peredaman yang intinya sama saja dengan kedua tahap sebelumnya. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.
- c. Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat.

Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin (2006:132) dalam mengklasifikasikan kedelapan tingkat partisipasi tersebut di atas menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama diklasifikasikan sebagai tidak partisipasi (*non-participation*), yaitu

tingkat manipulasi dan terapi. Tingkat kedua disebut dengan partisipasi semu (*degree of tokenism*), yaitu tingkat peredaman, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan. baik tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (*degree of citizen power*), yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.

Lebih lanjut Rival G. Ahmad (2003) yang mengacu kepada pendapat Arenstein, menyusun model yang dapat membantu untuk menilai tingkat partisipasi dalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan secara umum Perundang-Undangan/Peraturan Daerah. Secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

1. Tidak partisipatif (*Non participation*);
2. Derajat semu (*Degrees of tokenism*); dan
3. Kekuatan masyarakat (*Degrees of citizen power*)³⁰

Lebih lanjut dikatakannya “dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut. Derajat terbawah terdiri dari dua tingkat partisipasi, yaitu manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Dalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka yang timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme

pemerintahan. Tidak ada niatan sedikit pun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau program pemerintah. Derajat menengah (yang semu) terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yaitu: pemberitahuan (*informing*); konsultasi (*consultation*); dan peredaman (*placation*). Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun begitu tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik.

Sedangkan pada tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang rentan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan. Derajat tertinggi terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yakni kemitraan (*partnerships*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (*citizen control*). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil, dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan penguasa tradisional dalam posisi politik yang sejajar (tingkat kemitraan). Bahkan lebih jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan). Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya, yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut (tingkat kendali masyarakat).

Selain itu, Muluk (2007), menguraikan 6 tahapan partisipasi Arnstein di atas dan mengklasifikasikannya dalam 5 tingkat. Namun menurut Muluk hanya 4 tahapan yang tergolong partisipatif, satu tergolong nonpartisipatif karena partisipasi yang ada hanya formalitas, pengerahan masa ”bayaran” maupun distorsi informasi. Oleh sebab itu, tahap ini disebut dengan nonpartisipatif. Dan terakhir kendali warga (bukan lagi sekadar partisipasi, tetapi wargalah yang mengambil keputusan (*decision maker*). Gambaran lebih jelas lihat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi	Klasifikasi	
1.Kendali	Kendali Warga	
2.Delegasi	Partisipasi	Kuat
3.Kemitraan		Sedang
4.Konsultasi		
5.Informasi		Lemah
6.Manipulasi	Non Partisipasi	

Sumber: Muluk, 2007

Apa pun model partisipasi yang disediakan, tidak akan berarti jika masyarakat masih saja bersikap apatis terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah. Untuk itu harus ada strategi khusus untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi partisipasi masyarakat, antara lain:

- a. Mensolidkan kekuatan masyarakat terutama para stakeholders.
- b. Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat).
- c. Publikasi hasil-hasil investigasi atau riset-riset yang penting.
- d. Berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan.
- e. Memunculkan aksi dan gerakan secara kontinu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok- pokok permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut diharapkan mampu mendapatkan data yang valid dan relevan. Penelitian yang dilakukan untuk mencari gambaran fakta dan realita yang ada di lapangan dan di kaji berdasarkan realita- realita yang ada. Serta bertujuan mendiskripsikan secara sistematis.

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Denzin dan Liancoln sebagai mana dikutip oleh (Maleong,2008:5) menyebutkan bahwa peneliatian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, Penelitian yang digunakan juga penetian deskriptif yang diungkapkan Nazir (2005:54) menjelaskan bahwa: “metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondosi, suatu sisitem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan atar fenomena yang diselidiki”

di lapangan. Selain hal tersebut penelitian kualitatif bersifat terbuka dan lentur yang disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di studi lapangan. Dengan demikian metode penelitian metode ini dilakukan sebagai cara melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan melalui pengumpulan data untuk mencari pemecahan dari suatu permasalahan.

B. Fokus Penelitian

Moleong (2014: 237) mengatakan bahwa penentuan fokus penelitian akan membatasi studi, sehingga penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah penyaringan informasi yang masuk. Jadi untuk menentukan fokus penelitian ketajaman analisis sangat diperlukan dalam meluruskan informasi dan data-data penelitian.

Adapun fokus penelitian dapat mempermudah dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Fokus dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengelolaan Pasar Desa Landungsari

Pada fokus pertama peneliti menekankan pada empat hal yaitu:

- a) Perencanaan pengelolaan Pasar Desa Landungsari
- b) Pengorganisasian dalam hal pengelolaan Pasar Desa Landungsari
- c) Pengarahan dalam hal pengelolaan pasar desa Landungsari
- d) Pengawasan dalam pengelolaan Pasar Desa Landungsari

2) Faktor Penghambat yang dialami pemerintah desa dalam mengelola Pasar Desa Landungsari

Pada fokus kedua peneliti menekankan pada dua hal yaitu:

- a) Faktor Internal
- b) Faktor Eksternal

Berdasarkan penjelasan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif hal ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang ditemukan

Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian tersebut adalah Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs dalam penelitian adalah Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada kedua tempat tersebut akan diperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini berhubungan sumber-sumber informasi baik berupa orang-orang ataupun dokumen yang dapat menambah informasi peneliti. Dalam penelitian data yang akan ditulis haruslah memiliki sumber yang dapat mendukung dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penulis mengklasifikasikan data yang diperoleh dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, diperoleh dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari

- a. Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- b. Panitia pengelola Pasar Desa landungsari

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terlebih dulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti. Data tersebut berupa:

- a. Dokumen-dokumen/ arsip di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- b. Peraturan Perundang-undangan
 - Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Landungsari
 - Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari

Yang semuanya berkaitan dengan masalah yang sedang peneliti teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis untuk menyajikan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian. wawancara merupakan teknik dengan menggunakan pernyataan secara lisan kepada subjek penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memudahkan untuk mendapatkan data.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Pengamatan yang akan dilakukan menyesuaikan dengan objek penelitian. peneliti akan menggunakan catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder dengan cara mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang terkait dengan penelitian berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip resmi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

(Sugiono,2007:8) mengatakan “istrumen penelitian dengan pendekatan kualitatif instrumenya adalah human istrument, yaitu peneliti sendiri. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang di pergunakan oleh peneliti dalam

pengumpulan data yang dapat mendukung penelitiannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitiannya adalah:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. hal ini juga dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap data-data dan kenyataan di lapangan. Peneliti sebagai instrumen utama dengan menggunakan panca indra untuk menyaksikan dan mengamati objek atau fenomena dalam penelitian serta memungkinkan perluasan pengetahuan secara langsung karena memang berhubungan dengan responden seta keadaan di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang fokus terhadap permasalahan, penelitian yang digunakan untuk pedoman untuk peneliti melakukan wawancara untuk mengarahkan penelitian dalam rangka mencari data yang diinginkan. selain itu juga sebagai pengarah dalam proses wawancara agar berjalan secara efektif dan efisien.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang ini meliputi alat tulis-menulis dan buku catatan untuk membantu pencatatan hal-hal penting ketika melakukan penelitian.

F. Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis

diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau kabupaten malang.
2. Memaparkan informasi/fakta yang kemudian akan dianalisa dan dipaparkan hasilnya mengenai faktor-faktor yang menghambat pengelolaan pasar desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Penarikan kesimpulan dengan menguji validitas data sebelumnya agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hal diatas analisa dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 komponen. Alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles,Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi:

1. Pengumpulan Data (*Data Display*)

Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak dipiperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. reduksi data yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang

kepagawaian serta menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan memberakan perubahan wujud dari bentuk laporan- laporan sampai data tersebut siap disajikan.

3. Penyajian Data (*Data Collection*)

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian pelihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

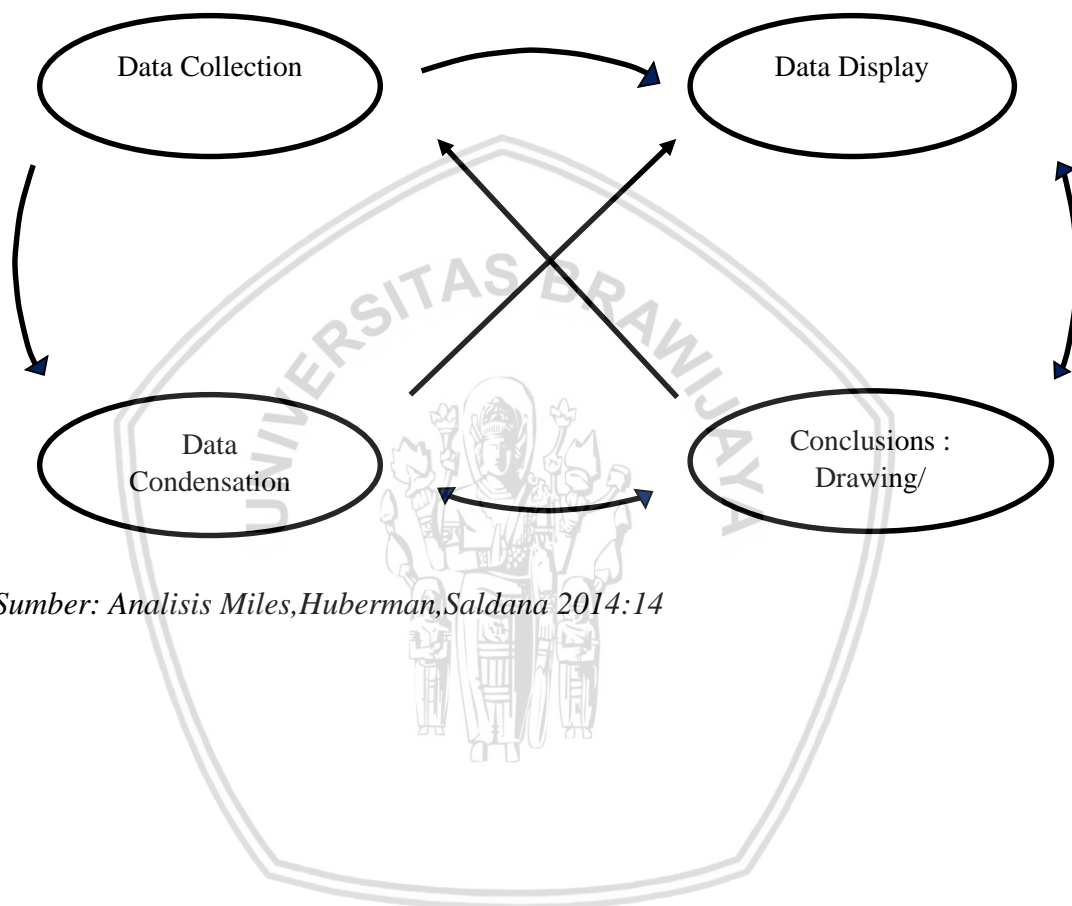
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan uraian diatas dalam penyajian data, masalah reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan

sebagai rangkaian analisis. Sehingga dalam penulisan skripsi dapat lebih terarah, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan dengan luas wilayah sekitar 3.530,65 km². Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua di propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dengan 33 Kecamatan dan 390 Kelurahan, ibu kota Kabupaten Malang bertempat di Kepanjen. Secara administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati. Lokasi pada peta Jawa Timur Kabupaten Malang ada pada tengah selatan bagian dari Propinsi Jawa Timur. Koordinat Kabupaten Malang 112° 17'10,90" sampai 112°57'00" Bujur Timur, dan 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan Populasi terbanyak di Jawa Timur dengan populasi 3,092,714 jiwa. Dari jumlah populasi sebesar 3,092,714 jiwa sumber pencaharian utama masyarakat Kabupaten Malang adalah dari sector agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan dari sektor industri terdapat dua pabrik gula Kerebet dan Kebon Agung yang menjadi pondasi industri Kabupaten Malang. Selain itu wilayah Kabupaten Malang dikenal dengan wisata alamnya yang sangat lengkap, seperti adanya Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Anjasmoro, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuno untuk wisata Pegunungan, untuk wisata air terdapat Waduk Selorejo dan wendit. Untuk wisata air terjun terdapat Coban Rondo, Coban Pelangi, air terjun

Banyu Anjlok dan masih banyak lagi coban yang lain. Wisata pantai di Kabupaten Malang juga tak kalah menarik, seperti Pantai Balekambang, Pantai Modangan, Pantai Bajul Mati, Pantai Lenggoksono dan masih banyak lagi wisata yang lain yang membuat daerah Kabupaten Malang merupakan tempat yang sangat strategis. Untuk mengetahui lebih dalam karakter daerah Kabupaten Malang akan di bahas dalam kondisi Geografis Kabupaten Malang.

a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Kondisi geografis dari Kabupaten Malang merupakan pegunungan atau dataran tinggi, yang memiliki curah hujan yang sangat besar sehingga memiliki banyak mata air dan aliran sungai-sungai besar di Jawa Timur. Seperti di daerah barat dan barat laut dari Kabupaten Malang terdapat Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). di gunung ini terdapat mata air dari Sungai Brantas yang bersumber di desa Tulungrejo yang alirannya membelah wilayah Kabupaten Malang menjadi dua dan sungai ini berakhir di bendungan Karangates. Di daerah utara Kabupaten Malang yang memiliki geografis dataran tinggi yang memiliki potensi tinggi akan perkebunan dan pertanian mengalir sungai Kunto yang mengalir di daerah Pujon sampai Bendungan Selorejo. Sedangkan di daerah timur dari Kabupaten Malang merupakan daerah pegunungan Bromo-Tengger-Semeru dengan puncak gunung Semeru (3.676 m) yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. Kabupaten Malang juga memiliki dataran rendah yang berkarakter daerah kapur yang cocok dengan perkebunan salak, kopi, dan tebu. Selain itu daerah Kabupaten Malang juga memiliki deretan pantai selatan Jawa yang sangat bagus untuk di kunjungi dan dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang.

b. Administrasi Wilayah

Batas Administratif Wilayah Kabupaten Malang terbagi ke dalam 33 Kecamatan, 377 desa dan 12 kelurahan; dengan 2.953 RW dan 14.665 RT. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1996 tentang Juklak Kepmendagri 25 Tahun 1996, klasifikasi desa/kelurahan di Kabupaten ini sudah berada pada tingkat swadaya sebanyak 295 desa/kelurahan dan tingkat swakarsa sebanyak 94 satu yakni Kecamatan Kepanjen, mencapai 2.019 orang per km². Kenyataan ini sangat mudah dipahami, sebab kecamatan Kepanjen, disamping sebagai daerah antipode bagi Kabupaten Blitar, juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan Donomulyo yakni hanya sebesar 338 orang per km². Kecamatan lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 1000 orang per km²; terdapat di kecamatan-kecamatan; Turen dengan 1.646 orang per km²; kecamatan Pakis dengan 1.946 orang per km²; kemudian kecamatan Pakisaji dengan kepadatan 1.837 orang per km²; kecamatan Pagelaran dengan 1.335 orang per km² dan kecamatan lainnya.

Daerah-daerah kecamatan dengan kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km, sebagian besar berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Malang meliputi: kecamatan Pagak, (488 orang/km²); kecamatan Bantur (411 orang/km²); kecamatan Gedangan (378 orang/km²); Sumbermanjing (364 orang/km²); Tirtoyudo (403 orang/km²); kecamatan Pujon dan Ngantang masing-masing 459 dan 362 orang/km² (BPS: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005:44).

Gambaran tentang distribusi penduduk Kabupaten Malang per Kecamatan dan tingkat kepadatannya.

Utara	: Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
Timur	: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang
Barat	: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Selatan	: Samudra Indonesia

Fisik Geografis Geologi Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, Wilayah ini dipagari oleh :

Utara	: Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399m)
Timur	: Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)
Barat	: Gunung Kelud (1.731m)
Selatan	: Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

c. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah satu pernyataan gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh satu lembaga pada jauh dimasa akan datang. Banyak interpretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP**

MANTEB.” Selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum, maka visi yang dirumuskan adalah“ **Mendukung Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.**“

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bagian Tata Pemerintahan Umum dimaksud, selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman bagi Bagian Tata Pemerintahan Umum dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan program-program yang ditetapkan. Dengan upaya mendayagunakan sumber daya yang ada (Pemerintahan, Dana dan SDM), maka Misi Bagian Tata Pemerintahan Umum ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Mewujudkan profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Mewujudkan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
4. Mewujudkan penanganan tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

d. Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Kabupaten Malang terletak pada kordinat $112^{\circ}17'10,90''$ sampai $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ sampai $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

e. Fisik Geografis geologi

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan daerah dataran tinggi di wilayah ini dipagari oleh:

Utara	: Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399m)
Timur	: Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)
Barat	: Gunung kelud (1.731m)
Selatan	: Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

f. Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu :

Kali Brantas : Bermata air di Dk. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates.

Kali Konto : Mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang).

Kali Lesti : Mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.

Kali Amprong: Mengalir di bagian Timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

g. Kependudukan

Berdasarkan data SUSENAS Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.232.841 (50,38%) jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.214.210 (49,62%) jiwa. total sebesar 2.447.051 jiwa.

Sexratio penduduk Kabupaten Malang sebesar 98,78% yang berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. kepadatan penduduknya mencapai 822 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Desa Landungsari

a. Gambaran Umum

Secara geografis Desa Landungsari terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar 700. m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Landungsari rata-rata mencapai 300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa Landungsari terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Jarak tempuh Desa Landungsari ke Ibukota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

b. Geografis Desa Landungsari

Desa Landungsari yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Dau, secara geografis Desa Landungsari terletak antara kota Malang dan Kota Batu. Topografi ketinggian desa

Landungsari berada pada daratan tinggi sekitar 540 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan BPS Kabupaten Malang tahun 2010,selama tahun 2010 curah hujan di desa Landungsari rata-rata mencapai 3000 mm.hujan terbanyak pada bulan Nopember dan Desember hingga mencapai 550 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000 s/d 2010 .

Secara administratif Desa Landungsari terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Landungsari memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 499 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun, yakni: Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara	: Kelurahan Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang
Timur	: Kelurahan Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang
Selatan	: Kelurahan Merjosari Kec.Lowokwaru Kota Malang
Barat	: Desa Tegal Weru dan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

c. Kondisi dan Ciri Geografis Wilayah

Luas wilayah desa Landungsari 399 ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti pemukiman, pertanian, perindustrian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang digunakan untuk pemukiman 161 ha terdiri atas pemukiman umum 16 ha dan 145 ha pemukiman KPR-BTN Luas lahan untuk pertanian 83 ha yang terdiri atas : Sawah irigasi teknis 53 ha dan 30 ha sawah tadah hujan .

Luas tanah tegalan 141 ha dan pemakaman umum 5 ha sedangkan untuk kegiatan ekonomi 0,7 ha dan untuk perkantoran, sekolahan dan lapangan serta jalan sekitar 9 ha .

Wilayah desa Landungsari secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok dengan pertanian. Secara prosentase kesuburan tanah dapat dipetakan sebagai berikut: tanah sangat subur 83 ha, tanah subur 30 ha dan tanah sedang 141 ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan 8 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di desa Landungsari.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, ubi jalar, dan ada sebagian tanaman tebu dan buah-buahan yang mampu menjadi sumber pendapatan (*income*) yang cukup dapat diandalkan penduduk desa di sektor pertanian, begitu juga tanaman sayuran seperti cabe merah, brungkul, jagung manis, tomat dan lainnya sangat memberikan harapan bagi masyarakat petani didesa.

d. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Pada jaman kolonial Belanda dengan penguasanya Ratu Yuliana dan Wilhelmina desa Landungsari dipimpin oleh seorang petinggi / lurah, yang sekarang disebut kepala desa, secara berurutan sebagai berikut:

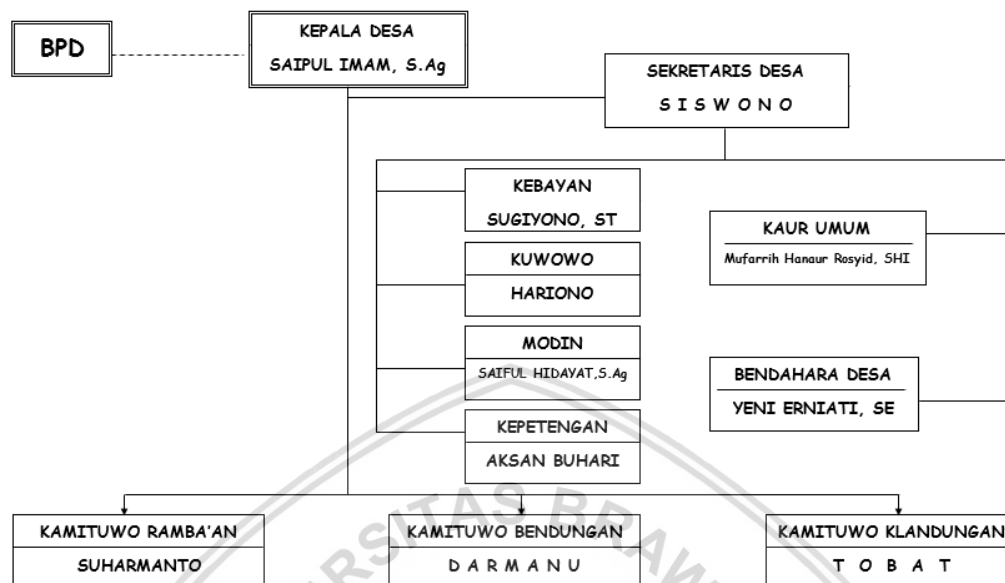
Tabel 2. Daftar Nama Kepala Desa

NO	KEPALA DESA	DARI TAHUN	SAMPAI TAHUN
1.	Bapak Denan	tahun 1920	tahun 1924
2.	Bapak Saji	tahun 1924	tahun 1930
3.	Bapak Sri	tahun 1930	tahun 1936
4.	Bapak Saimin	tahun 1936	tahun 1942
5.	Bapak Damat	tahun 1942	tahun 1944
6.	Bapak Dasim	tahun 1944	tahun 1951
7.	Bapak Tirto Utomo	tahun 1951	tahun 1986
8.	Bapak Ibrahim (PJS)	tahun 1986	tahun 1988
9.	Bapak Imam Slamet	tahun 1988	tahun 1996
10.	Bapak Supadi (PJS)	tahun 1996	tahun 1998
11.	Bapak H. Ahmad Danu	tahun 1998	tahun 2007
12.	Bapak H. Ahmad Danu	tahun 2007	tahun 2013
13.	Bapak Saipul Imam, S. Ag	tahun 2013	sekarang

Sumber: Kantor Desa Landungsari 2015

Tabel nomor 1 menerangkan tentang susunan Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1920 hingga tahun 2013. Dari ketiga belas kepala desa yang pernah menjabat di desa Landungsari, hanya Bapak H. Ahmad Danu yang pernah menjabat sebanyak dua periode. Yaitu pada periode 1998 – 2007 dan terpilih kembali pada periode 2007 – 2013.

Gambar 3. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Kantor Desa Landungsari 2015

Gambar di atas menjelaskan tentang bagaimana struktur organisasi Desa Landungsari saat ini. Kepala Desa berkoordinasi dengan BPD digambarkan dengan garis putus-putus. Kepala Desa berkoordinasi secara instruktif dengan Sekdes dan Kamituwo dari 3 daerah yaitu Ramba'an, Bendungan, dan Klandungan. Sedangkan Sekdes membawahi beberapa perangkat desa diantaranya Kaur Umum, Bendahara Desa, Kebayan, Kuwowo, Modin, dan Kepetengan. Alur dan pola koordinasi dari Sekdes ke Perangkat Desa juga dilakukan secara instruktif.

e. Demografi Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2013, jumlah penduduk desa landungsari adalah 9641 jiwa, dengan rincian 4949 laki-laki dan 4692 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2492 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Landungsari maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klarifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	878 orang	8 %
2	5-9	707 orang	8 %
3	10-14	750 orang	8 %
4	15-19	881 orang	9 %
5	20-24	739 orang	8 %
6	25-29	813 orang	8 %
7	30-34	693 orang	8 %
8	35-39	754 orang	8 %
9	40-44	675 orang	8 %
10	45-49	787 orang	9 %
11	50-54	702 orang	8 %
12	55-58	670 orang	7 %
13	>59	591 orang	4 %
Jumlah Total		9641 orang	100 %

Sumber: Kantor Desa Landungsari 2015

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa landungsari sekitar 4461 orang atau hampir 47%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Landungsari perlu perhatian. Dari jumlah 2492 KK di atas, sejumlah 200 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 253 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 691 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 752 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 596 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera

dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 18 % KK Desa Landungsari adalah keluarga miskin.

f. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Landungsari

Tabel 4. Tabel Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	96
2	Tidak Tamat SD	161
3	Tamat Sekolah SD	2.020
4	Tamat Sekolah SMP	1.964
5	Tamat Sekolah SMA	3.424
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	1.976
Jumlah Total		9.641

Sumber: Kantor Desa landungsari

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Landungsari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Landungsari, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Landungsari baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Landungsari yaitu melalui pelatihan dan kursus. Misalnya pelatihan ketrampilan perbengkelan dan otomotif yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Bahkan Desa Landungsari telah menggagas untuk adanya SMK Negeri di Desa Landungsari dengan gagasan tersebut di atas nantinya desa Landungsari mampu menyiapkan tenaga-tenaga terampil sesuai kebutuhan.

g. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Landungsari dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang,

yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5. Tabel Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	470 orang
2	Jasa/ Perdagangan	
	1.Jasa Pemerintahan	821 orang
	2.Jasa Perdagangan	762 orang
	3. Jasa Angkutan	44 orang
	4.Jasa Keterampilan	764 orang
	5. Jasa lainnya	67 orang
3	Sektor Industri	120 orang
4	Sektor lain	159 orang
Jumlah		3.207 Orang

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Dengan melihat data tabel 4 diatas maka angka pengangguran di Desa Landungsari masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum / tidak bekerja berjumlah 156 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 7017 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Landungsari.

h. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Penduduk Desa Landungsari terdiri atas berbagai pemeluk agama, diantaranya: Islam, Katolik, Kritten dan Hindu. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama.

Tabel 6. Nama-Agama dan Pemeluknya

No	Nama Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	9202 Orang	95.44 %
2	Katolik	274 Orang	2.84 %
3	Kristen	147 Orang	1.52 %
4	Hindu	18 Orang	0.18 %

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Seperti daerah lain di Indonesia pada umumnya, agama Islam berada pada urutan pertama dengan jumlah pemeluk paling banyak di Desa Landungsari. Jika dilihat dari tabel nomor 5 diatas jumlah penduduk Desa Landungsari yang beragama islam hampir mendominasi. Terhitung dari jumlah prosentase yang di dapat peneliti dari data administratif di Kantor desa Landungsari jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 95% lebih. Sementara jumlah penduduk yang memeluk agama selain islam asing-masing tidak sampai mencapai angka 3%. Seperti pemeluk agama Katolik yang hanya berjumlah 2,84% dari prosentase keseluruhan, pemeluk agama Kristen 1,52% dari jumlah prosentase keseluruhan, dan pemeluk agama Hindu yang hanya 0,18% dari jumlah prosentase keseluruhan penduduk Desa Landungsari.

i. Dinamika Politik Desa

Kehidupan politik Desa Landungsari berjalan cukup harmonis, ini dapat dilihat dari setiap kali berlangsung pesta demokrasi selalu berjalan aman, lancar dan kondusif, ini menunjukkan kematangan warga desa Landungsari dalam berdemokrasi.

Berikut adalah tabel berdasarkan jumlah pengguna hak suara dalam pesta demokrasi.

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

No	Nama Kegiatan	Jumlah Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Pengguna hak suara - %
1	Pil. Legislatip	5379	2623	2756	68,49
2	Pil. Presiden	5707	2843	2864	65,00
3	Pil. Gubernur	5387	2653	2734	50,89
4	Pil. Bupati	7985	2676	5309	60,00

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Dari tabel 6 di atas pada kolom Jumlah Pemilih menunjukkan bahwa animo masyarakat atau penduduk Desa Landungsari terhadap politik cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran warga desa terhadap perlunya berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyalurkan hak suara cukup baik. Terlihat pada kolom Penggunaan Hak Suara prosentase pemilih mencapai lebih dari 50%. Tabel tersebut juga memperlihatkan animo pemilih meningkat pada pemilihan Bupati.

j. Aspek-Aspek Sosial budaya

Wilayah dusun Rambaan Kondisi sosial budaya masyarakat semakin maju hal ini ditunjukan jumlah kemiskinan yang semakin mengecil, meskipun tiga dusun yang berada dibawah wilayah Landungsari ada perbedaan situasi dan kondisi perekonomian, yang padat penduduknya, baik penduduk yang tinggal menetap maupun penduduk pendatang dari luar karena kuliah ataupun kerja di suatu lembaga di Kota ataupun di Kabupaten Malang, sehingga banyak rumah tinggal diubah menjadi rumah kos, usaha pertokoan, warung dan jasa rental computer fotocopy dan lain-lain.

Dusun Bendungan merupakan pusat Pemerintahan Desa Landungsari, di sini dibangun Kantor Desa, Puskesmas, Pasar Desa BUMDES. Dusun Bendungan berdekatan dengan dusun Rambaan, imbas kemajuan perekonomian dusun Rambaan akan juga mewarnai perekonomian dusun Bendungan. Perumahan yang semakin padat dan banyak pengembang yang membangun perumahan di dusun Bendungan, Dibangunnya jembatan penghubung antara Kota Malang dan desa Landungsari di wilayah dusun Bendungan merupakan jalur alternatif masuk Kota Malang, arus lalu lintas semakin padat dan roda perekonomian semakin lancar.

Dusun Klandungan berada paling selatan wilayah Landungsari, dari segi perekonomian masih sedikit tertinggal dari dua dusun diatas (Bendungan dan Rambaan). Masyarakatnya sebagian masih bekerja dalam bidang pertanian, sebagian pegawai negeri dan pedagang. Wilayahnya sangat luas, seiring dengan perkembangan masyarakat banyak juga pengembang membangun perumahan di dusun Klandungan. Aset transportasi cukup lancar adanya jalur Mikrolet STL.

Pada umumnya Desa Landungsari masyarakatnya sangat menjunjung budaya leluhur, gemar bergotongroyong, adat dan tradisi masih dipertahankan, di samping itu masyarakat Desa Landungsari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan model keterbukaan dan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat desa dan memaksimalkan kinerja Pemerintah Desa, serta peran aktif BPD dalam merencanakan, mengendalikan, memonitoring pelaksanaan pembangunan masyarakat desa Landungsari, faktor-faktor yang

menyebabkan masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan desa saat ini dapat diminimalisir.

k. Visi dan Misi Desa Landungsari Kecamatan Dau

Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberii predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Landungsari adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN
BERSIH GUNA MEWUJUDKAN DESA LANDUNGSARI YANG ADIL, MAKMUR
DAN SEJAHTERA"**

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan desa dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

3. Gambaran Umum Pasar desa Landungsari

Pasar Desa Landungsari terletak di Jalan Tirto Rahayu Landungsari dengan luas keseluruhan 6.100 m², berfungsi sebagai tempat transaksi kebutuhan rumah tangga, Sayur, Daging, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan pertanian dan peternakan. Pasar desa Landungsari didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Secara geografis Pasar Landungsari terletak diantara pemukiman warga tepatnya berada di kawasan Tirto belakang Terminal Landungsari. Akses menuju Pasar Landungsari cukup mudah setelah pemerintah desa membangun jalan baru sebagai akses langsung dari terminal Landungsari menuju pasar.

Pasar Landungsari secara umum berbentuk seperti pasar pada umumnya dimana tersedia beberapa kios yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar untuk disewakan atau di kelola sendiri oleh *user* atau pemilik kios. Jumlah pedagang di Pasar Landungsari tidak banyak, hanya sekitar 10 pedagang saja. Jenis dagangan yang dijual pun beraneka ragam mulai dari pakan ternak, daging potong, perabot rumah tangga hingga makanan-makanan ringan.

Berikut adalah keadaan Pasar Desa Landungsari:



Gambar 4. Papan Nama Pasar Desa Landungsari

Sumber: dokumentasi peneliti 2015

Berikut adalah gambar Papan Nama Pasar Desa Landungsari. Pasar Landungsari dikelola oleh Pemerintah Desa Landungsari dan diatur dengan Peraturan desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari.



Gambar 5. Kondisi Kios Pasar Landungsari

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015

Kondisi terkini pasar Landungsari banyak kios yang tutup. Banyaknya kios yang tutup dikarenakan kurangnya animo masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli di pasar desa Landungsari. Para pedagang lebih memilih menjual barang dagangannya dengan berkeliling menggunakan kendaraan pribadi.



Gambar 6. Kondisi samping Pasar Landungsari bagian barat

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015

Bagian barat Pasar Landungsari merupakan jalan yang terhubung ke terminal landungsari. Jalan ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung daripada peningkatan aktivitas di pasar landungsari dengan memanfaatkan aktivitas padat di terminal landungsari. Aktivitas yang ramai di terminal landungsari diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di pasar landungsari



Gambar 7. Bagian dalam Pasar Desa Landungsari

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015

Pada bagian dalam pasar hanya terdapat satu kios yang buka. Toko tersebut adalah warung yang menjajakan makanan / warung nasi. Terlihat dari gambar diatas kios-kios di samping warung tersebut tutup atau bahkan tidak ada yang mengelola. Pasar Landungsari hanya sedikit memiliki *user* yang menjual dagangannya.



Gambar 8. Bagian depan Pasar Landungsari

Sumber : Dokumentsi Peneliti 2015

Gambar 5 diatas memperlihatkan tampilan depan dari Pasar Landungsari. Terlihat dari depan tampak pada bagian tengah Pasar Landungsari terdapat

lapangan futsal yang telah disediakan pengelola untuk disewakan secara umum. Pada bagian depan Pasar Landungsari terdapat area parkir yang cukup luas.



Gambar 9. Bagian samping sebelah barat Pasar Landungsari

Sumber: Dokumentasi peneliti 2015

Pada bagian samping sebelah barat Pasar landungsari terlihat ada beberapa kios yang buka. Kios-kios yang buka tersebut bukanlah kios yang menjual dagangan layaknya kios pasar pada umumnya. Kios-kios tersebut malah dijadikan tempat tinggal bagi beberapa orang. Terdapat beberapa keluarga yang tinggal di kios Pasar Landungsari. Kepada peneliti mereka mengaku menyewa kios tersebut kepada *user* (pemilik kios di Pasar Landungsari).



Gambar 10. Bagian depan Pasar Landungsari

Sumber: dokumentasi peneliti 2015

Bagian depan pasar landungsari terdapat banyak pedagang yang yang menjajakan dagangannya. Dari keseluruhan Pasar Landungsari hanya bagian depannya saja yang ramai diisi pedagang. Terhitung terdapat 10 pedagang yang terdapat di bagian depan Pasar Landungsari. Jenis pedagang yang berjualan di bagian depan Pasar Landungsari diantaranya; pedagang pakan ternak, makanan, perabot rumah tangga dan lain sebagainya.



Gambar 11. Bagian depan Pasar Landungsari tampak dari samping

Sumber: Dokumentasi peneliti 2015

Gambar 8 diatas memperlihatkan bagian depan Pasar Landungsari dari samping. Terlihat pada gambar tersebut beberapa kios tampak berjualan. Berbeda dengan bagian lain dalam Pasar Landungsari yang nampak sepi penjual. Bagian ini merupakan bagian yang paling ramai pedagang.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a) Perencanaan (*Planning*)

Pasar Landungsari didirikan dan dibangun oleh Pemerintah Desa Landungsari dengan tujuan untuk menampung beberapa hasil potensi desa seperti peternakan, dan hasil-hasil panen lainnya milik warga Landungsari. Beberapa pedagang yang berjualan pada kios di Pasar Landungsari memang terlihat menjual beberapa hasil produk ternak. Sebagai contoh di pasar Landungsari terdapat pedagang ayam potong, berbagai jenis pakan untuk ternak dan lain sebagainya. Selain dari segi sumber daya alam (SDA), Pasar Landungsari juga diharapkan dapat memanfaatkan serta menaungi kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Prayit sebagai berikut:

Dulunya pasar ini didirikan agar bisa menampung hasil panen atau hasil ternak warga sini mas. Biar ada tempatnya itu kalau mau jualan. Toh orang-orang sini juga ada yang berprofesi sebagai pedagang. Ada yang dagang sayur, dagang perabot-perabot rumah tangga, ada yang dagang ayam potong dan lain-lain mas. Dari pada mereka keliling kampung seperti itu, kalau ada tempat yang menampung seperti pasar ini Iya jadi lebih mudah. Harapan awalnya di dirikan pasar di Landungsari ini ya tidak terlepas dari hal-hal itu. (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar landungsari)

Pasar Landungsari mulai dirumuskan dan mulai dirancang pada sekitar tahun 2003 tepatnya pada saat periode pertama kepemimpinan Bapak H. Ahmad

Danu sebagai Kepala Desa Landungsari. Bapak H. Ahmad Danu menjabat sebagai Kepala Desa Landungsari selama dua periode yaitu pada periode 1998 – 2007 dan diteruskan periode berikutnya 2007 – 2013. Pada saat itu Panitia Pembentukan Pasar Landungsari berada dibawah wewenang dari Bapak H Ahmad Danu sebagai Kepala Desa. Hal ini disebutkan oleh Bapak Prayit sebagai berikut:

Pasar Landungsari itu dirumuskan dan mulai dibangun kira-kira sekitar tahun 2003 mas. Pada saat itu Kepala Desa yang menjabat di sini (Desa landungsari) masih Pak Danu (Bapak H. Ahmad Danu). Jadi pada saat itu yang mengesahkan dan menetujui dibangunnya Pasar Landungsari ya Pak Danu bukan Pak Saipul Imam (Kepala Desa saat ini). Pasar Landungsari kira-kira selesai dibangun ya sekitar tahun 2004 – 2005 itupun masih belum selesai semua masih ada beberapa hal-hal kecil yang perlu diselesaikan. (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

Demikian di sisi lain Bapak Saipul Imam selaku Kades yang menjabat saat ini juga menyatakan hal yang sama bahwa Pasar Landungsari merupakan proyek dari Kepala Desa periode sebelumnya yaitu pada saat periode pertama Bapak H Ahmad Danu menjabat sebagai Kades Landungsari.

Panitia Pengelola Pasar memiliki kewajiban mengelola dan merawat Pasar Landungsari guna menjadikan Pasar Landungsari sebagai pusat pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat desa. Dalam perjalanannya Panitia Pengelola Pasar telah menentukan beberapa regulasi terkait tata tertib yang ditujukan bagi para *user* atau para penyewa kios di Pasar Landungsari. Regulasi tersebut berupa Peraturan Desa yang disahkan oleh Kades. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari.

Perdes tersebut diantaranya mengatur beberapa hal seperti tata ruang pasar serta pemungutan retribusi bagi para penyewa kios atau *user* . Pemerintah Desa

beserta Panitia Pengelola Pasar telah membuat klasifikasi bagi tempat dan ruang di dalam pasar. Klasifikasi tersebut membedakan antara Pertokoan dan Los atau *bedak*. Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 membedakan ruang dan tempat di Pasar landungsari berdasarkan letak. Pertokoan, kios, dan Los atau *bedak* yang terletak pada bagian depan Pasar Landungsari dimasukkan dalam klasifikasi kelas satu pada Perdes tersebut, dimana harga sewanya paling mahal diantara kelas-kelas lain dalam klasifikasi yang diatur oleh Panitia Pengelola Pasar dan Pemerintah Desa. Kelas kedua adalah pertokoan, kios, Los atau *bedak* yang menghadap pintu masuk sebelah samping Pasar Landungsari. Sedangkan kelas ketiga adalah pertokoan, kios, dan Los atau *bedak* yang berada di bagian dalam Pasar Landungsari. Hal tersebut seperti yang diucapkan oleh Bapak prayit sebagai berikut:

Kios-kios disini harga sewanya beda-beda mas, yang paling mahal ya yang di depan ini. Pokoknya yang sederet didepan ini kelas satu kalo menurut perdes tentang pasar waktu itu. Nah kalo yang masuk samping sampek sederet di sebelah barat sana itu kelas dua, harga sewanya lebih murah dari pada yang sederet di depan ini. Nah, yang paling murah yang di dalam yang dekat dengan lapangan futsal itu yang paling murah. Itu masuk klasifikasi kelas tiga mas. (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pasar Landungsari didirikan dan di rancang sedemikian rupa oleh Panitia Pengelola Pasar Desa yang di bentuk oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Panitia Pembentukan Pasar Landungsari ini terdiri dari beberapa orang yang menjabat sebagai perangkat desa dan sebagian kecil

masyarakat landungsari. Hal ini senada dengan yang dikatakan Bapak Prayit selaku mantan Bayan di Desa Landungsari, yang menjelaskan bahwa:

Pemerintah Desa Landungsari membentuk sebuah kepanitiaan dalam rangka membangun sebuah pasar desa. Kepanitiaan tersebut terdiri dari beberapa orang perangkat desa dan beberapa orang dari warga desa Landungsari. Panitia Pembentukan Pasar tersebut bertugas dari mulai merancang, membangun, hingga mengelola pasar landungsari. Panitia pembentukan pasar itu berada di bawah wewenang Kades. (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

Panitia Pembentukan Pasar Landungsari diberikan mandat oleh Kades sebagai pengelola Pasar. Kepanitiaan tersebut berfungsi sebagai badan yang berwenang di Pasar Landungsari tentunya dibawah pengawasan Kades. Panitia berwenang mengatur tata guna tempat atau ruang dalam pasar. Dalam hal ini komposisi pengelolaan pasar Landungsari seluruhnya dipegang oleh Panitia Pengelolaan Pasar Landungsari dan tidak ada keikutsertaan BUMDes di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Bapak Prayit kepada peneliti pada saat wawancara 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari, beliau mengatakan, “BUMDes Landungsari itu memiliki produk sendiri mas, mereka (BUMDes) lebih berkonsentrasi pada produk-produknya sendiri ketimbang ikut berkecimpung di Pasar Landungsari. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Pasar Landungsari”. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Saipul Imam selaku Kepala Desa Landungsari yang menjabat pada periode 2013 hingga saat ini. Beliau mengatakan:

BUMDes Landungsari memiliki beberapa produk yang bersumber dari potensi desa. Demikian dalam hal ini Pasar Landungsari bukan bagian dari salah satu produk milik BUMDes. Pengelolaan Pasar Landungsari diserahkan kepada

sebuah panitia yang dibentuk khusus sebagai pengelola Pasar Landungsari pada saat itu. Memang pada saat perumusan Pasar Desa saat itu semua elemen yang ada di Desa Landungsari dilibatkan tak terkecuali BUMDes. Tapi dalam perjalanannya BUMDes tidak terlibat dalam pengelolaan Pasar Landungsari. (wawancara pada 10 Maret 2015 di Kantor Desa Landungsari)

Landasan hukum terbentuknya Pasar Desa Landungsari adalah Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan Desa Landungsari. Pada perdes tersebut pengertian dan pengelolaan pasar telah dijabarkan pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi; Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola BUMDes Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

Pengelolaan pasar Landungsari diserahkan pada koordinator yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pasar desa Landungsari sesuai dengan yang tertuang dalam Perdes No 4 tahun 2010 pasal 1 ayat 13 yang berbunyi; Koordinator Bidang Pasar yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penataan dan pengelolaan pasar. Dalam hal ini yang berperan sebagai koordinator yang dimaksud adalah pemerintah desa beserta perangkatnya, seperti yang tertuang dalam perdes tersebut pada bab 2 tentang penyelenggaraan dan penataan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; Pemerintah Desa menyelenggarakan pasar yang dibangun dan dikelola

oleh Pemerintah Desa dan atau BUMDes; lalu diperkuat oleh pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; Kepala Desa berwenang menetapkan tata guna tempat atau ruangan serta lokasi di pasar. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa memiliki wewenang secara penuh terhadap penyelenggaraan pasar desa Landungsari.

Kepala Desa memiliki kuasa atas izin penggunaan ruang dan tempat dalam pasar desa. Dimana pihak-pihak yang menginginkan untuk menempati atau menggunakan ruang di pasar harus melalui persetujuan Kepala Desa secara tertulis yang diatur dalam keputusan Kepala desa. Hal ini diterangkan dalam Perdes No 4 tahun 2010 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi; Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat dan atau ruangan pasar tanpa izin dari Kepala Desa; pasal 2 ayat 4 yang berbunyi; Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat atau ruangan pasar harus memperoleh Izin pemakaian secara tertulis dari Kepala Desa; dan pasal 2 ayat 8 yang berbunyi; Tata cara dan syarat-syarat permohonan Izin Pemakaian Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengelola pasar Landungsari membagi ruang dan tempat di pasar dalam beberapa kriteria dan klasifikasi. Perdes Landungsari No 4 tahun 2010 telah menjelaskan hal tersebut pada pasal 2 ayat 6 sebagai berikut;

Klasifikasi tempat atau ruangan di dalam pasar ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pertokoan :

- Tempat Kelas I : Pertokoan yang menghadap ke jalan raya;
- Tempat Kelas II : Pertokoan yang menghadap ke jalan samping Pasar;
- Tempat Kelas III : Pertokoan yang menghadap belakang pasar dan ke dalam pasar

b. Bedak dan los :

- Tempat kelas I : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk depan pasar/ jalan raya;
- Tempat kelas II : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk samping Pasar;
- Tempat Kelas III : Bedak dan Los yang letaknya berdekatan dengan jalan masuk pertokoan yang menghadap belakang pasar dan di dalam Pasar.

Para *user* sebagai pihak pemegang Izin Pemakaian Pasar dikenakan biaya sewa tempat dan biaya administrasi. Biaya sewa tersebut terdiri dari dua hal yaitu biaya Sewa Tempat Usaha dan biaya Sewa Tempat Bongkar Muat Barang. Sewa tempat dan biaya administrasi tersebut telah diterangkan pada Perdes Nomor 4 Tahun 2010 di Pasal 5 yang berbunyi; Pemegang Izin Pemakaian Pasar dikenakan biaya Sewa Tempat Usaha dan biaya Sewa Tempat Bongkar Muat Barang bagi setiap kendaraan yang membongkar dan atau menaikkan barang dan atau untuk parkir di tempat dalam kawasan Pasar, yang disediakan oleh Pemerintah Desa;

Pemegang izin (*user*) yang ingin menambah fasilitas lainnya secara lengkap pun juga dikenakan biaya tambahan sesuai dengan yang tertulis pada perdes tersebut di pasal 6 sebagai berikut:

Pemegang izin yang menggunakan/menambah fasilitas lainnya secara tetap dalam kegiatan perdagangan di pasar, dikenakan biaya administrasi, jika akan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi pemasngan saluran air minum;
- b. Izin pemakaian tempat pemasangan reklame;
- c. Rekomendasi pemasangan telepon
- d. Rekomendasi pemasangan listrik
- e. Permohonan izin merubah jenis dagangan/komoditi.

Pihak-pihak atau *user* yang akan menempati atau berdagang di Pasar Landungsari wajib mematuhi tata tertib yang telah disusun oleh pemerintah desa

sebagai pengelola pasar. Tata tertib tersebut berupa Kewajiban dan Larangan yang diatur dalam Perdes No 4 tahun 2010 Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Pemegang Izin, pedagang dan pemakai fasilitas Pasar Desa Landungsari :
 - a. Memelihara kebersihan, keamanan tempat prasaran dan dagangan di lingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayar Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalulintas orang di dalam pasar;
 - c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran, kecuali bagi para pedagang yang berjualan di halaman atau pelataran pasar;
 - e. Menempati toko, bedak, dan los atas namanya sendiri sesuai izin yang diberikan;
- 2) Larangan bagi Pedagang / Pemakai Fasilitas Pasar landungsari:
 - a. Merombak, menambah dan atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin Kepala Desa;
 - b. Menjualbelikan dan memindah tangankan izin tanpa seizin Kepala Desa;
 - c. Menggelar barang dagangan ditempat lain selain dari yang telah ditentukan oleh Kepala Desa;
 - d. Bertempat tinggal di dalam pasar pada waktu antera penutupan dan pembukaan pasar;
 - e. Memasang alat penutup layar atap, tenda dan tambahan lainnya yang dapat mengganggu keindahan pasar;
 - f. Menggelar barang dagangan dan atau membuat peneduh barang dagangan;
 - g. Menggelar barang dagangan untuk dijual atau melakukan pekerjaan atau kerusakan jalan masuk/ keluar atau jalan penghubung pasar;
 - h. Meletakkan barang dagangan disepanjang jalan pejalan kaki;
 - i. Menjual minum-minuman keras atau berjudi di dalam pasar;
 - j. Melakukan satu perbuatan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
 - k. Membuang sampah idah pada tempatnya, merusak lapangan pasar, pelataran atau bangunan pasar;

- l. Memperluas area atau tempat menggelar barang dagangan;
- m. Mendirikan Los atau bangunan dalam Lapangan Pasar;
- n. Menyalakan api secara permanen;
- o. Menimbun barang/ atau menjual barang yang mudah terbakar;
- p. Menyalurkan aliran listrik dari toko/ bedak ke tempat yang lain tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Adapun sanksi yang mengikat bagi para *user* seperti yang dijabarkan pada bab 5 tentang sanksi dan pencabutan izin pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Izin hak pakai fasilitas Pasar Desa Landungsari dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Desa ini;
 - b. Izin Pemakaian Pasar telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemegang izin tidak menempati tempat atau ruangan yang telah diberikan izin pemakaian pasar, dan kepala desa telah memberikan peringatan dengan waktu yang cukup maka kepala desa mencabut secara sepihak izin pemakaian pasar yang telah diberikan tanpa ganti rugi;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan telah memberikan teguran dalam waktu yang cukup, maka kepala desa menarik kembali dan atau membatalkan izin pemakaian pasar yang telah diberikan tanpa ganti rugi;
 - e. Bangunan pasar akan dihapus atau dipindahkan manakala digunakan oleh pemerintah daerah/pemerintah desa untuk kepentingan umum.
- (2) Selain pencabutan izin, pemegang izin yang melanggar ketentuan pasar 7 peraturan desa ini dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Retribusi Pasar Desa Landungsari diatur dalam beberapa pasal pada Perdes Landungsari di Bab 4 tentang Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, dan Bab 5 tentang Golongan Restribusi. Berikut pasal-pasal yang menerangkan tentang retribusi di Pasar Landungsari:

Pasal 9

Setiap, orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa Landungsari wajib membayar retribusi dengan nama Retribusi Penataan dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa toko, kios, bedak los dan tenda, serta halaman ikutannya yang khusus disediakan untuk berdagangatau kegiatan perdagangan.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 12

Retribusi Penataan dan pengelolaan Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Retribusi tersebut terdiri dari dua jenis retribusi, yaitu Retribusi Harian dan Retribusi jasa Keramaian. Keduanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Demikian dalam hal pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Landungsari ini diserahkan kepada Panitia Pengelola Pasar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010. Dalam Perdes tersebut disebutkan bahwasanya BUMDes adalah sebuah badan yang seharusnya diberikan tugas sebagai pengelola Pasar Landungsari, terlebih jika melihat dari fungsi dari BUMDes Landungsari yang berperan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

a. Pengarahan (*Actuating*)

Data sebelumnya telah menjabarkan bagaimana Pasar Desa Landungsari didirikan melalui proses yang terdiri atas perencanaan dan pelimpahan wewenang dalam mengelola Pasar Landungsari. Tentunya hal-hal tersebut memerlukan arahan dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah Kepala Desa. Kepala Desa dapat menggunakan kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang berdirinya Pasar Landungsari. Termasuk di dalamnya memberi perintah tentang apa yang harus dilakukan dengan bertujuan agar tugas-

tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan oleh Kepala Desa tersebut diatur pula dalam Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa; Kepala Desa berwenang menetapkan tata guna tempat atau ruang serta lokasi di pasar. Lalu pada ayat 3; setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat dan atau ruangan pasar tanpa izin dari Kepala Desa. Dan pada ayat 4; Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat atau ruangan pasar harus memperoleh izin pemakaian secara tertulis dari Kepala Desa. Ketiga ayat dari pasal 2 Perdes Landungsari Nomor 4 tahun 2010 tersebut menjelaskan tentang bagaimana wewenang seorang Kepala Desa dalam hal ini sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberlangsungan dari Pasar Landungsari.

Bapak Prayit dalam hal ini membenarkan bahwasanya Kepala Desa saat itu Bapak H. Ahmad Danu memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan segala urusan terkait keberlangsungan Pasar Landungsari. Terbukti dari terbentuknya Panitia Pengelola Pasar yang menggantikan tugas BUMDes tersebut atas arahan dari Kepala Desa. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

Waktu itu Kades nya membuat keputusan kalau pasar ini yang mengelola bukan BUMDes tapi Panitia Pengelola Pasar. Kalau BUMDes kan badan sendiri mas (berdiri sendiri) tapi kalau Panitia Pengelola Pasar itu kan yang membentuk kades sendiri jadi ya Panitia waktu itu bekerja atas dasar arahan dari Kades. Mereka yang membentuk juga kades, jadi bisa dikatakan panitia itu tim nya Kades untuk mengelola pasar itu mas.
(wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

b. Pengawasan (*Controlling*)

Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 di buat dan disusun dengan maksud sebagai acuan dan tolok ukur dari tujuan serta pelaksanaan pembangunan Pasar Landungsari. Dengan kata lain Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010

berfungsi sebagai pengontrol berjalannya Pasar Landungsari secara tertulis. Namun dalam perjalanannya pemerintah desa dan panitia pengelola pasar tidak terlalu menggunakan Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 sebagai landasan dalam mengelola pasar. Dalam perdes tersebut pun tidak semua aspek diatur di dalamnya. Termasuk siapa saja yang berhak menyewa tempat, bagaimana prosedur penyewaan tempat dan ruang di Pasar Landungsari, serta pelunasan biaya sewa ruang dan tempat di Pasar Landungsari tidak diatur secara terperinci dalam perdes. Perdes tersebut hanya menerangkan bawasannya pihak-pihak yang akan menyewa ruang dan tempat di pasar Landungsari harus mengantongi izin secara tertulis dari Kepala Desa Landungsari saja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Landungsari memegang penuh kendali atas ruang dan tempat di Pasar Landungsari.

Demikian yang terjadi di lapangan adalah yang bertindak sebagai *user* atau penyewa ruang dan tempat di Pasar Landungsari adalah Panitia Pengelola Pasar sendiri. Dari sekian banyak kios, bedak/los yang tersedia di Pasar Landungsari beberapa sudah dipesan oleh Panitia Pengelola Pasar sendiri, terutama pada ruang dan tempat di Pasar Landungsari yang dinilai strategis. Menurut Bapak Prayit sebagian besar kios dan tempat di Pasar Landungsari sudah terisi atau di pesan oleh Panitia sendiri sehingga pihak-pihak lain selain panitia sudah tidak bisa mendapatkan tempat yang diinginkan di Pasar Landungsari. Jika ditinjau dari Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010, yang Mengatur bahwa Kepala Desa memiliki wewenang dalam menentukan siapa saja yang berhak mengisi ruang dan tempat di pasar landungsari maka dalam hal ini tentunya Kepala Desa sebagai

pengontrol berjalannya Pasar Landungsari adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Terlebih yang terjadi di lapangan saat itu panitia yang menyewa tempat di pasar Landungsari menyewakan kembali ruang dan tempat yang ada di pasar Landungsari. Dengan begitu panitia pengelola pasar sebagai *user* bisa mendapatkan uang sewa dari orang lain yang menyewa. Terkait hal ini penututan dari Bapak Prayit sebagai berikut:

Yang terjadi waktu itu kios-kios disini ini disewa sendiri sama panitia. Jadi ya panitia itu merangkap. Ya sebagai panitia, ya sebagai *user*. Lalu sama mereka (Panitia yang merangkap sebagai *user*) bedak dan los yang mereka sewa itu di sewa kan lagi ke orang lain. Jadi nanti orang yang nyewa itu bayarnya ya bukan ke Desa tapi ke Panitia. Dari sini ini orang juga jadi mikir dua kali kalau mau menyewa tempat di pasar sini (Pasar Landungsari). Mereka berfikir kalau tempat yang mereka sewa itu ternyata atas nama panitia maka biaya sewa nya bisa lebih mahal (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar landungsari)

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan

Dau Kabupaten Malang

a. Faktor Eksternal

Demikian dalam perjalanan pengelolaan Pasar Desa Landungsari yang dilakukan oleh Panitia Pengelola Pasar dan Pemerintah Desa Landungsari menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut mempengaruhi perkembangan Pasar Landungsari yang digadang-gadang menjadi pusat perekonomian warga setempat. Beberapa hambatan mulai bermunculan sehingga mempengaruhikondisi internal di dalam tubuh Panitia Pengelola Pasar. Konflik internal di dalam tubuh Panitia Pengelola Pasar tersebut semakin meluas sehingga beberapa tujuan dari dibangunnya Pasar Landungsari tidak tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

Pemerintah Desa Landungsari untuk menambal kekurangan-kekurangan agar Pasar Landungsari dapat tetap berjalan seperti rencana awal.

Faktor letak Pasar Landungsari yang bisa dikatakan kurang strategis menjadi salah satu penyebab dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya pengelolaan Pasar Landungsari. Seperti yang diketahui Pasar Landungsari terletak di dalam perkampungan tepatnya dibelakan terminal Landungsari. Dikatakan oleh Bapak Prayit bahwa akses menuju pasar saat itu hanya berasal dari bagian barat Pasar Landungsari saja. Hal ini dikarenakan bagian timur Pasar Landungsari merupakan daerah perkampungan padat yang tidak dilewati angkutan kota. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Desa membangun jalan sebagai akses dari terminal Landungsari menuju Pasar Landungsari. Jalan tersebut terletak disamping sebelah barat pasar Landungsari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saipul Imam Kepala Desa Landungsari sebagai berikut:

Masalah akses menuju Pasar Landungsari memang menjadi perhatian pemerintah desa saat itu sebagai pengelola pasar Landungsari. Dari beberapa kali hasil diskusi dengan berbagai pihak termasuk pemilik tanah dan panitia pengelola pasar, akhirnya disepakati untuk membangun jalan sebagai akses dari Terminal Landungsari menuju Pasar Landungsari. Harapannya jalan itu nantinya dilewati angkutan kota supaya memudahkan orang-orang yang ingin menuju pasar Landungsari. (wawancara pada 10 Maret 2015 di Kantor Desa Landungsari)

Demikian disisi lain kios-kios, toko, dan Los atau *bedak* yang ditawarkan pengelola tidak semua terisi oleh pedagang. Dari beberapa kios-kios, toko, dan Los atau *bedak* yang tersewa oleh *user* hanya terdapat pada bagian depan dan beberapa bagian samping pasar saja. Para pedagang dan masyarakat yang berdagang kebutuhan sehari-hari seperti penjual sayur, penjual ayam, penjual peralatan-peralatan rumah tangga dan lain sebagainya lebih memilih untuk mendagangkan

dagangannya dengan cara berkeliling menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil bak. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih berdiam di rumah sembari menunggu pedagang yang lewat daripada harus pergi ke Pasar Landungsari untuk melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut di jelaskan pula oleh Bapak Saipul Imam sebagai berikut:

Kios-kios dan *bedak* (Los) di Pasar Landungsari yang terisi oleh *user* itu cuma di bagian depan sama samping saja mas, selebihnya ya kosong. Itupun yang dagangannya beroprasi cuma yang depan aja. Yang bagian samping itu di sewa-sewakan lagi sama *user* nya. Jadi yang bagian tengah (bagian dalam Pasar Landungsari) ya kosong. Makanya sama Panitia waktu itu sampai di bangun lapangan futsal untuk disewakan biar ada kegiatan di Pasar Landungsari. Pedagang-pedagang disini daripada berdagang di Pasar mereka lebih senang berdagang keliling kampung pakai gerobak atau kendaraan pribadi bagi yang punya kendaraan. (wawancara pada 10 Maret 2015)

Faktor letak Pasar Landungsari yang kurang strategis dan faktor pedagang yang memilih menjual barang dagangannya di Pasar Landungsari tentunya berpengaruh terhadap pengelolaan Pasar Landungsari yang kurang maksimal. Dimana hal tersebut menyebabkan kegiatan jual beli di Pasar Landungsari tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Faktor Internal

Faktor penghambat Pengelolaan Pasar Landungsari di sisi lain juga disebabkan oleh kesenjangan yang terjadi di tubuh Panitia Pengelola Pasar sendiri. Dimana Panitia Pengelola Pasar juga menyewa kios di Pasar Landungsari dan bertindak sebagai *user* namun tidak bersikap secara profesional. Panitia Pengelola Pasar yang juga bertindak sebagai *user* dengan menyewa kios di Pasar Landungsari tersebut dinilai terlalu memonopoli ruang dan tempat di Pasar Landungsari. Para *user* lain menganggap demikian dikarenakan satu orang panitia bisa menyewa

sampai empat kios maupun Los di Pasar Landungsari. Sedangkan Panitia yang juga bertindak sebagai *user* tidak hanya satu-dua orang saja melainkan cukup banyak. Tentunya hal tersebut membuat *user* lain merasa tidak diuntungkan karena tempat-tempat yang dinilai strategis sudah dipesan dan diisi oleh Panitia Pengelola Pasar terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak prayit sebagai berikut:

Salah satu masalah yang menghambat perkembangan pasar pada waktu itu juga berasal dari tubuh panitia sendiri sebagai pengelola. Beberapa dari mereka juga ikut menyewa *bedak* di pasar dan nyewanya itu *nggak* tanggung-tanggung mas. Satu orang panitia bisa mengambil empat *bedak* dan itu di tempat-tempat yang strategis semua. Jadi ya *user* lain tidak kebagian tempat yang bagus pada saat itu (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

Menurut Bapak Prayit sikap tidak transparan dari beberapa Panitia Pengelola Pasar juga menjadi salah satu penyebab kesenjangan yang terjadi ditubuh Panitia sendiri. Sikap tidak transparan yang dimaksud adalah antara kewajiban dan kewenangan Panitia Pengelola Pasar sebagai pihak pengelola dan sebagai *user*. Beberapa orang mempermasalahkan dan mempertanyakan sikap Panitia Pengelola Pasar yang juga berperan sebagai *user* karena sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait pihak Panitia yang juga berhak menyewa *bedak*. Hal tersebut bahkan juga dipertanyakan oleh pihak panitia sendiri yang tidak ikut menyewa tempat di Pasar Landungsari. Dengan demikian maka timbul perpecahan di tubuh Panitia Pengelola Pasar itu sendiri.

Panitia yang tidak ikut menyewa tempat di Pasar Landungsari beserta *user* lain sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan penyewaan ruang dan tempat di Pasar Landungsari oleh Panitia Pengelola Pasar sendiri. Namun masalah yang muncul dari kasus tersebut adalah sikap dari panitia yang menyewa *bedak* di Pasar

Landungsari yang menyewakan kembali kios, toko, dan Los atau *bedak* nya kepada pihak lain. Sikap panitia yang menyewa untuk disewakan tersebut menuai beberapa reaksi negatif dari beberapa pihak. Hal itu dikarenakan sikap panitia tersebut terkesan *separticalo*. Disamping itu diketahui para panitia yang juga bertindak sebagai *user* tersebut, mereka belum menyelesaikan urusan administrasi terkait penyewaan ruang dan tempat di Pasar Landungsari. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Prayit sebagai berikut:

Orang-orang saat itu sampai bisa berpikiran negatif ke panitia juga karena dari pihak panitianya sendiri yang seolah-olah tidak transparan mas. Tidak transparan itu dalam hal penyelesaian administrasi terkait penyewaan kios dan *bedak* disini (Pasar Landungsari). Sedangkan mereka sibuk mengurus administrasi *user-user* yang lain. Padahal kita tahu ada beberapa diantara panitia yang juga menyewa kios *bedak* disini itu juga belum melunasi biaya administrasinya. (wawancara pada 3 Maret 2015 di Pasar Landungsari)

Konflik tersebut tentunya menghambat keberlangsungan pengelolaan Pasar Landungsari. Terlebih dalam hal tersebut panitia bersikap tidak kooperatif dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu masalah yang ada. Konflik di kepanitiaan tersebut mempengaruhi minat masyarakat yang akan menyewa ruang dan tempat di Pasar Landungsari. Tidak sedikit dari beberapa calon *user* yang pada awalnya berminat dan antusias menjadi menarik minatnya tersebut untuk menyewa ruang maupun tempat di Pasar Landungsari. Beberapa diantara mereka beralasan tidak ingin terlibat dengan permasalahan di Pasar Landungsari, dan beberapa lainnya beralasan tidak ingin masalah tersebut mengganggu mata pencaharian mereka sebagai pedagang. Maka dari itu para calon *user* menarik diri dan memilih menjual dagangannya dengan berkeliling kampung. Dengan begitu kios, toko, dan Los atau *bedak* di Pasar Landungsari menjadi banyak yang tidak laku dan kosong.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a) Perencanaan (*Planning*)

Cropper (1998: 1) menjelaskan bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Adapun aspek perencanaan menurut Suharsimi Arikunto, (1993: 38) meliputi:

1. *Apa yang dilakukan.* Hal ini dilakukan dengan menyediakan kios pasar untuk pedagang masyarakat sekitar Desa Landungsari. Pemerintah Desa beserta Panitia Pengelola Pasar telah membuat klasifikasi bagi tempat dan ruang di dalam pasar. Klasifikasi tersebut membedakan antara Pertokoan dan Los atau *bedak*. Perdes Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 membedakan ruang dan tempat di Pasar landungsari berdasarkan letak. Pertokoan, kios, dan Los atau *bedak* yang terletak pada bagian depan Pasar Landungsari dimasukkan dalam klasifikasi kelas satu pada Perdes tersebut, dimana harga sewanya paling mahal diantara kelas-kelas lain dalam klasifikasi yang diatur oleh Panitia Pengelola Pasar dan Pemerintah Desa. Kelas kedua adalah pertokoan, kios, Los atau *bedak* yang menghadap pintu masuk sebelah samping Pasar Landungsari. Sedangkan kelas ketiga adalah pertokoan, kios, dan Los atau *bedak* yang berada di bagian dalam Pasar Landungsari.
2. *Siapa yang melakukan.* Pasar Landungsari mulai dirumuskan dan mulai dirancang pada sekitar tahun 2003 tepatnya pada saat periode pertama kepemimpinan Bapak H. Ahmad Danu sebagai Kepala Desa Landungsari. Bapak H. Ahmad Danu menjabat sebagai Kepala Desa

Landungsari selama dua periode yaitu pada periode 1998 – 2007 dan diteruskan periode berikutnya 2007 – 2013. Pada saat itu Panitia Pengelola Pasar Landungsari berada dibawah wewenang dari Bapak H Ahmad Danu sebagai Kepala Desa. Panitia Pengelola Pasar memiliki kewajiban mengelola dan merawat Pasar Landungsari guna menjadikan Pasar Landungsari sebagai pusat pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat desa. Sehingga Pasar Landungsari merupakan proyek dari Kepala Desa periode sebelumnya yaitu pada saat periode pertama Bapak H Ahmad Danu menjabat sebagai Kades Landungsari. Pelaku pelaksanaannya dilakukan oleh pembentukan panitia pengelola pasar dengan wewenang kepala desa. Penyelenggaraan pasar desa Landungsari menetapkan kepala desa sebagai pemilik kuasa atas penggunaan ruang dan tempat dalam pasar. Dimana pihak-pihak yang menginginkan untuk menempati atau menggunakan ruang di pasar harus melalui persetujuan Kepala Desa secara tertulis yang diatur dalam keputusan Kepala Desa.

3. *Di mana akan melakukan.* Perencanaan lokasi berada di Pasar Desa Landungsari sebagai objek pembangunan pasar.

Melihat dari perencanaan diatas terdapat ketidaksesuaian dengan hasil pengelolaan Pasar Desa Landungsari yang tidak melibatkan masyarakat. Fungsi masyarakat menjadi objek atau penerima manfaat dari adanya suatu perencanaan. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kurang adanya keinginan masyarakat untuk bertindak lebih dalam proses pembuatan perencanaan pasar desa. Perencanaan tersebut menggunakan pendekatan *top-bottom*, dimana pemerintah

desa membuat rencana terstruktur dengan membentuk panitia pengelola pasar desa dan menjadikan masyarakat penerima manfaat dari adanya pembentukan panitia. Hasil di lapangan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Panitia pengelola pasar terlalu mendominasi dalam hal perencanaan sehingga antusiasme masyarakat menjadi kurang dan menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah. Sedangkan apabila partisipasi masyarakat besar akan berdampak dengan manfaat yang diterima lebih jelas. Perencanaan yang dilakukan masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Sundriamunawar (2006:46) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Bahkan suatu program yang tidak didukung oleh partisipasi masyarakat tidak memiliki arti apa-apa, artinya hasil pembangunan tersebut tidak akan bisa dinikmati dalam waktu yang lama bahkan lebih jauh lagi hasil pembangunan itu tidak akan lestari karena tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Penyelenggaraan pasar Desa Landungsari lebih menekankan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Sehingga pengorganisasian menjadi salah satu aspek pengelolaan dengan tujuan masyarakat sekitar Desa Landungsari dapat

berpartisipasi dan meningkatkan perekonomian dengan adanya pasar desa. Berdirinya Pasar Desa Landungsari merupakan salah satu bentuk pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah desa setempat demi terwujudnya pertumbuhan dan perubahan dalam segi sosial masyarakat maupun ekonomi masyarakat Landungsari. Sebagaimana yang disampaikan Siagian (2007:6) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Selain itu, melalui Pasar Landungsari, pemerintah setempat dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Desa Landungsari. Seperti yang dijelaskan Usman (2004:6) dalam buku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bahwa sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan dalam rangka mensejahterkan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh kelompok masyarakat, maupun individu.

Sedangkan makna pembangunan menurut Sudriamunawar (2006:89) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Demikian dalam hal ini berdirinya Pasar Landungsari bisa dikatakan pula

sebagai salah satu bentuk dari usaha Pemerintah Desa setempat untuk membawa masyarakatnya ke arah perkembangan yang lebih maju. Pembentukan Pasar Landungsari mempunyai satu proses usaha dengan sadar untuk dilaksanakan, dan pelaksanaannya berorientasi terhadap pertumbuhan dan perubahan.

Dari definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Pembentukan pasar desa Landungsari merupakan proses, dimana prosesnya melibatkan perangkat desa dan masyarakat untuk berkoordinasi dalam penyelenggaraan pasar desa yang bermanfaat. Proses pembentukan tersebut harus dimaknai dengan pendekatan partisipatif.
2. Pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dalam suatu proses pembaharuan yang dilaksanakan secara continue. Pada dasarnya pembentukan pasar Desa Landungsari menjadikan masyarakat agar lebih maju dengan mengembangkan usaha melalui pasar desa.
3. Rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan dengan suatu rencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Rencana tersebut tertuang dalam peraturan desa sebagai landasan hukum dan rencana penyelenggaraan pasar Desa Landugsari.
4. Pembangunan yang dilaksanakan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai disini bersifat multidimensional yang mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan pasar desa

Landungsari tidak hanya tertuju dalam pembangunan infrastruktur fisik pasar maupun penyediaan ruang kosong, namun juga tertuju untuk memberdayakan masyarakat dalam mensejahterakan ekonomi.

Dimensi perencanaan pembangunan diatas dapat memperkuat keberadaan dari pasar desa. Keberadaan pasar desa sejatinya dapat menjadikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi mereka sendiri disamping potensi yang dimiliki oleh desa. Dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pembangunan desa. Berkaitan dengan pembangunan desa, perlu disoroti pendapat Bryan dan white (1987) yang dikutip dalam Sastropetro (1986:43) yang menyatakan bahwa peran mendasar administrator pembangunan perdesaan adalah menyeleksi proses dan organisasi yang paling cocok untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Seorang administrator sebenarnya dapat memilih cara pendekatan diatas yang lebih efisien dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena segala sesuatu disampaikan secara langsung. Kemungkinan juga dapat memilih suatu pendekatan yang mengarah pada penggerakan peningkatan produksi dengan lebih banyak memperhatikan strategi dari bawah yang partisipatif.

Pengelolaan pembangunan pada tingkat desa merupakan proses yang inovatif, kreatif dan responsif yang akan senantiasa mencakup berlangsungnya kegiatan belajar dan adaptasi. Dalam prakteknya, seluruh proses pembangunan adalah proses adaptasi dan belajar. Disini pulalah dituntut peranan penuh administrator dalam pembangunan. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan peran Pemerintah Desa Landungsari sebagai administrator untuk mengarahkan masyarakatnya dengan pendekatan yang efisien dalam melakukan pembangunan

desa. Dengan demikian Pasar Landungsari sebagai produk desa merupakan salah satu wujud dari pembangunan desa. Karena dengan adanya Pasar Landungsari dapat memudahkan pemerintah desa setempat untuk membangun masyarakatnya agar lebih inovatif, kreatif, dan responsif tentunya dengan pendekatan yang partisipatif.

Meskipun pasar Landungsari termasuk proses dari pembangunan, namun hanya sebagian kios saja yang beroperasi sedangkan kios-kios yang lain dialih fungsikan menjadi tempat tinggal bagi beberapa orang. Hal tersebut mencerminkan masih ada ketidakcocokan dalam pengelolaan pasar desa dan pelaksanaannya.. Pengelolaan tersebut tentunya harus memperhatikan beberapa aspek yang terdapat di Desa Landungsari sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Pasar Landungsari dikelola oleh BUMDes Landungsari sesuai yang telah dijabarkan pada pasal 1 ayat 14. Perdes No 4 tahun 2010 pasal 1 ayat 13 yang berbunyi; Koordinator Bidang Pasar yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penataan dan pengelolaan pasar. Koordinator bidang pasar tersebut meliputi pemerintah desa beserta perangkat desa. Penataan dan pengelolaan pasar tersebut tentunya sesuai dengan makna pembangunan yang diarahkan untuk mencapai kemajuan lahiriah dan kemajuan batiniah bagi seluruh masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun desa. Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan.

Hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan administrasi pembangunan untuk mendesain suatu rencana pembangunan yang efektif sebagai salah satu tugas pembangunan pemerintah. Kemudian administrasi pembangunan bermakna kemampuan untuk mendesain penyempurnaan administrasi bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan. Adanya pelaksanaan administrasi pembangunan menjadikan pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam mengelola pasar desa Landungsari. Pengelolaan pasar Landungsari tersebut menjadi bagian dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Gerakan pembangunan dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan dan penataan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; Pemerintah Desa menyelenggarakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan atau BUMDes; lalu diperkuat oleh pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; Kepala Desa berwenang menetapkan tata guna tempat atau ruangan serta lokasi di pasar. Wewenang kepala desa menjelaskan bahwa besarnya tanggung jawab sebagai kontrol dan pengendali dalam sebuah pembangunan, khususnya penyelenggaraan pasar desa Landungsari. Namun, setiap penyelenggaraan pasar desa Landungsari juga harus melihat keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan.

Tidak terlaksananya dengan baik pada saat pengorganisasian dikarenakan tidak sinkronnya peraturan desa tentang BUMDes. Pada dasarnya BUMDes Desa Landungsari mengatur tentang pasar desa karena mempunyai output yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Namun, kenyataannya BUMdes Desa Landugsari tidak terlalu berperan didalamnya. Hal tersebut

dikarenakan pembentukan panitia dari kepala desa dan perangkat desa yang perannya menggantikan BUMDes.

Padahal sesuai dengan pengertian Rue dan Byars (2006:6) berpendapat pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Panitia Pengelola Pasar telah menentukan beberapa regulasi terkait tata tertib yang ditujukan bagi para *user* atau para penyewa kios di Pasar Landungsari. Regulasi tersebut berupa Peraturan Desa yang disahkan oleh Kades. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari. Dalam hal ini komposisi pengelolaan pasar Landungsari seluruhnya dipegang oleh Panitia Pengelola Pasar Landungsari dan tidak ada keikutsertaan BUMDes di dalamnya. Padahal, sesuai dengan peraturan Desa Landungsari nomor 2 tahun 2008 tentang pembentukan BUMDes menjelaskan BUMDes adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa. Padahal makna pengorganisasian untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

Pergeseran peran diatas membuat BUMDes di Desa Landungsri lebih menekankan kearah produk desa yang lain. BUMDes Landungsari memiliki beberapa produk yang bersumber dari potensi desa. Dalam hal ini Pasar Landungsari bukan bagian dari salah satu produk milik BUMDes. Pengelolaan Pasar Landungsari diserahkan kepada sebuah panitia yang dibentuk khusus sebagai pengelola Pasar Landungsari. Memang pada saat perumusan Pasar Desa, semua

elemen yang ada di Desa Landungsari dilibatkan tak terkecuali BUMDes. Tapi dalam perjalanannya BUMDes tidak terlibat dalam pengelolaan Pasar Landungsari. Pasar Landungsari lebih diatur oleh panitia pengelola Pasar Desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat yaitu perangkat desa dan sebagian kecil masyarakat landungsari.

Mengingat peran dan tujuan BUMDes sesuai peraturan Desa Landungsari no.2 tahun 2008 tentang pembentukan BUMDes yang mencakup, meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dan menciptakan lapangan kerja. Jenis usaha BUMDes termasuk meliputi, kegiatan perekonomian perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Hal tersebut menjelaskan adanya BUMDes jelas mengarah kearah pasar desa secara acuan hukum pembentukan BUMDes. Namun secara empiris penyelenggaraan pasar desa lebih diatur dalam panitia pengelola pasar. Sehingga dapat dikatakan mekanisme pengelolaan pasar Desa Landungsari berada dalam panitia pengelola pasar dengan wewenang kepala desa.

Pengorganisasian juga kurang melibatkan masyarakat setempat dikarenakan pengorganisasian dengan membentuk panitia pengelola pasar desa. Komponen panitia pengelola pasar desa sebagiannya juga ada dari masyarakat namun masih didominasi oleh perangkat desa. Lebih lanjut Diana Conyers sebagaimana yang dikutip oleh Supriatna (2000:14) mengemukakan bahwa ada alasan utama mengapa

partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting, karena partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek pembangunan akan gagal. Selain itu masyarakat akan lebih mengetahui proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Berdasarkan landasan hukum diatas maka diperlukan sebuah pengelolaan pasar desa Landungsari sebagai gerakan dan upaya pembangunan bagi masyarakat. Sehingga pengelolaan menjadi proses dalam mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan makna dan pengertian pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Indikator pengelolaan dapat dilihat dari proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspek pengelolaan menurut Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

c) **Pengarahan (Actuating)**

Pengarahan yang dilakukan panitia pengelola pasar Landungsari masih belum terlihat sepenuhnya. Panitia pengelola pasar sebagai kontrol untuk mengarahkan masyarakat dalam menempati kios justru bertindak sebagai penerima

manfaat. Panitia pengelola pasar menempati beberapa kios kosong untuk berjualan. Pengarahan lebih banyak dilakukan sesama panitia pengelola pasar dan masyarakat sebagai arah dan tujuan pembangunan tidak didahulukan. Penggunaan pasar Landungsari lebih dominan dikuasai oleh panitia pengelola pasar pada saat itu. Padahal Pasar Landungsari didirikan dan dibangun oleh Pemerintah Desa Landungsari dengan tujuan untuk menampung beberapa hasil potensi desa seperti peternakan, dan hasil-hasil panen lainnya milik warga Landungsari. Lebih lanjutnya pembangunan desa pada dasarnya dimaksudkan dalam memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan.

Penataan, penyelenggaraan infrastruktur, ketentuan kios dan perizinan merupakan bentuk pengelolaan pasar desa Landungsari. Kemudian mekanismenya dilakukan dengan koordinasi langsung melalui panitia pengelola pasar yang dibentuk kepala desa dengan melibatkan perangkat desa dan sebagian masyarakat Landungsari. Mekanisme dan koordinasi langsung tersebut disebut sebagai bentuk pengarahan dalam aspek pengelolaan. Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Sedangkan menurut Kaho (1997:114) bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan jenis partisipasi masyarakat menurut Kaho (1997) diatas menjelaskan bahwa tidak ada satupun jenis partisipasi yang ada dalam mekanisme pengelolaan pasar Desa Landungsari. Proses pembuatan keputusan berada dalam wewenang penuh kepala desa dengan pembentukan panitia pengelola pasar dan mengabaikan fungsi BUMDes. Pelaksanaannya juga berada pada kontrol panitia pengelola desa, masyarakat sekitar hanya sebagian saja yang menjadi panitia pengelola desa. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil lebih terlihat dari panitia pengelola pasar itu sendiri. Panitia pengelola pasar ada yang menempati kios di pasar Landungsari sehingga masyarakat masih sedikit dalam pemanfaatan hasilnya. Padahal panitia pengelola pasar harusnya lebih menunjukkan dalam merangsang partisipasi masyarakat sekitar Desa Landungsari, bukan hanya mendominasi pengelolaan pasar desa. Sedangkan untuk partisipasi evaluasi masih berada dalam lingkup perangkat desa kurang melibatkan peran aktif warga sekitar.

Pengarahan yang terlibat tidak menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Pengarahan hanya dilakukan melalui satu komunikasi dari atas ke bawah sehingga masyarakat yang ingin menempati kios harus memenuhi persyaratan mutlak dari pihak panitia pengelola pasar. Meskipun begitu pengarahan juga kurang terkoordinasi dengan baik dikarenakan masih ada permasalahan internal panitia pengelola pasar sehingga mengganggu komunikasi yang terjadi dengan masyarakat sekitar.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Perencanaan sebagai *input*, pengorganisasian sebagai pondasi struktur pelaksanaan, pengarahan sebagai proses pelaksanaan. Dari hal tersebut, pengawasan menjadi *controlling* dari beberapa aspek pengelolaan lainnya. Menurut Sutarno NS, (2004:128) pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Pengawasan dalam pengelolaan pasar desa dilakukan oleh panitia pengelola pasar. Panitia pengelola pasar desa masih kurang dalam pengawasan dikarenakan berbagai permasalahan internal. Kegagalan ini dapat disebabkan konsep *control top-bottom* yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat.

Sedangkan secara konsep pengembangan desa menjelaskan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi tetapi sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk pengelolaan pasar Desa Landungsari. Adanya “*Independent Community*” dalam landasan hukum dapat mewujudkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pasar desa yang bersaing. Pengelolaan pasar desa yang bersaing tersebut dapat memaksimalkan potensi desanya dimana masyarakat dapat menjual belikan hasil pertanian maupun ternak di Pasar

Landungsari. Sehingga masyarakatlah yang menikmati dari hasil pembangunan bukan panitia pengelola Pasar landungsari.

Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin (2006:132) mengklasifikasikan kedelapan tingkat partisipasi tersebut di atas menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama diklasifikasikan sebagai tidak partisipasi (*non-participation*), yaitu tingkat manipulasi dan terapi. Tingkat kedua disebut dengan partisipasi semu (*degree of takenism*), yaitu tingkat peredaman, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan. baik tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (*degree of citizen power*), yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dari tingkatan partisipasi tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pasar Desa Landungsari masih belum terlihat, sehingga dapat dikategorikan *non-participation*. Pengelolaan pasar Desa Landungsari termasuk *non-participation* dikarenakan, dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan pasar desa tersebut.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Setiap pelaksanaan pasti terdapat hambatan maupun kendala. Hambatan tersebut bisa mencakup dari internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan

penghambat dari dalam pelaksanaan dan faktor eksternal merupakan penghambat dari luar pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa Landungsari tidak sesuai dengan strategi dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sekitar Desa Landungsari. Berikut ini faktor-faktor penghambat eksternal dan internal pengelolaan Pasar Desa Landungsari :

a. Faktor Eksternal

- 1) Letak Pasar Desa Landungsari kurang strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari letak pasar di dalam perkampungan tepatnya dibelakang terminal Landungsari. Selain itu akses menuju pasar masih terkendala, akses menuju pasar hanya dari bagian barat Pasar Landungsari. Akses yang minim juga disebabkan dari bagian timur pasar yang merupakan daerah perkampungan padat dan tidak dilewati angkutan kota. Pemerintah desa khususnya Desa Landungsari sudah membahas akses ke Pasar Landungsari dengan membangun jalan sebagai akses dari Terminal Landungsari menuju Pasar Landungsari.
- 2) Kurangnya antusiasme masyarakat Desa Landungsari dalam mengisi kios-kios di pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kios-kios, toko, dan Los atau *bedak* yang tersewa oleh *user* hanya terdapat pada bagian depan dan beberapa bagian samping pasar saja. Para pedagang dan masyarakat yang berdagang kebutuhan sehari-hari seperti penjual sayur, penjual ayam, penjual peralatan-peralatan rumah tangga dan lain sebagainya lebih memilih untuk mendagangkan dagangannya dengan cara berkeliling menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor

dan mobil bak. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih berdiam di rumah sembari menunggu pedagang yang lewat daripada harus pergi ke Pasar Landungsari untuk melakukan kegiatan jual beli. Selain itu *user* yang menyewa kios, seperti di bagian samping pasar nantinya akan disewakan lagi ke *user* yang lain. Sehingga disini tidak ada ketertarikan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Kebiasaan pedagang-pedagang di Desa Landungsari lebih senang berdagang lebih dengan cara berkeliling kampung menggunakan gerobak atau kendaraan pribadi daripada menjual dagangannya di pasar yang telah disediakan.

b. Faktor Internal

- 1) Kesenjangan yang terjadi dalam panitia pengelola pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari panitia pengelola pasar yang menyewa kios di Pasar Landungsari dan bertindak sebagai *user*. Pada dasarnya panitia pengelola pasar lebih bertugas dalam mengkoordinasikan masyarakat sekitar Desa Landungsari dengan kios-kios di pasar. Namun tindakan panitia pengelola pasar yang bertindak sebagai *user* tidak sesuai dengan perencanaan. Panitia pengelola Pasar Landungsari tersebut dinilai terlalu memonopoli ruang dan tempat di Pasar Landungsari. Hambatan lainnya dapat dilihat juga dari satu orang panitia bisa menyewa sampai empat kios maupun Los di Pasar Landungsari. Sedangkan Panitia yang juga bertindak sebagai *user* tidak hanya satu-dua orang saja melainkan cukup banyak. Tentunya hal tersebut membuat *user* lain merasa tidak

diuntungkan karena tempat-tempat yang dinilai strategis sudah dipesan dan diisi oleh Panitia Pengelola Pasar terlebih dahulu.

- 2) Tidak transparannya dan konflik panitia pengelola pasar. Sikap tidak transparan dari panitia pengelola pasar dilihat dari kewajiban dan kewenangan yang tidak sesuai dengan peran panitia pengelola pasar. Tidak adanya koordinasi antar panitia pengelola pasar dalam keberpihakan panitia pengelola sebagai user penyewa. Dari hal tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi dalam panitia pengelola pasar. Konflik tersebut tentunya menghambat keberlangsungan pengelolaan Pasar Landungsari. Terlebih dalam hal tersebut panitia bersikap tidak kooperatif dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu masalah yang ada. Konflik di kepanitiaan tersebut mempengaruhi minat masyarakat yang akan menyewa ruang dan tempat di Pasar Landungsari.
- 3) Kurangnya komunikasi antar panitia pengelola pasar. Komunikasi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai perubahan-perubahan nilai dan sikap di dalam proses pembaharuan dan pembangunan tanpa menimbulkan tekanan, frustasi dan friksi. Komunikasi tidak hanya harus datang dari atas, melainkan harus bersifat timbal balik (dua arah). Komunikasi seperti ini erat hubungannya dengan kepemimpinan dan peranan serta hubungan kepemimpinan di dalam suatu masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pasar desa, maka pedagang atau masyarakat desa merupakan pihak penerima informasi, sedangkan kepala desa dan panitia pengelola pasar desa merupakan pemberi

informasi pemerintah. Sebagai pemberi informasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat haruslah dapat dipahami oleh masyarakat secara mengena, terutama penyewaan kios untuk masyarakat desa sekitar Desa Landungsari. Sehingga masyarakat akan tergugah untuk berpartisipasi diseluruh kegiatan mekanisme pengelolaan Pasar Desa Landungsari.

- 4) Disfungsinya kios karena penyewa *user* sebagian adalah panitia pengelola pasar itu sendiri. Panitia pengelola pasar menyewa kios untuk disewakan kembali sehingga adanya reaksi negatif dari masyarakat setempat. Selain itu, sebagian panitia pengelola pasar yang bertindak sebagai *user* juga ada yang belum menyelesaikan urusan administrasi terkait penyewaan ruang dan tempat di Pasar Landungsari. Maka dari itu para calon *user* menarik diri dan memilih menjual dagangannya dengan berkeliling kampung. Dengan begitu kios, toko, dan Los atau *bedak* di Pasar Landungsari menjadi banyak yang tidak laku dan kosong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat disimpulkan dari beberapa fokus berikut ini.

a. Perencanaan

Hal ini dilakukan dengan menyediakan kios pasar untuk pedagang masyarakat sekitar Desa Landungsari. Pasar Landungsari mulai dirumuskan dan mulai dirancang pada sekitar tahun 2003 tepatnya pada saat periode pertama kepemimpinan Bapak H. Ahmad Danu sebagai Kepala Desa Landungsari. Perencanaan lokasi berada di Pasar Desa Landungsari sebagai objek pembangunan pasar. Perencanaan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan hasil pengelolaan Pasar Desa Landungsari yang tidak melibatkan masyarakat. Fungsi masyarakat menjadi objek atau penerima manfaat dari adanya suatu perencanaan. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kurang adanya keinginan masyarakat untuk bertindak lebih dalam proses pembuatan perencanaan pasar desa.

b. Pengorganisasian

Pengelolaan Pasar Desa Landungsari tersebut menjadi bagian dari upaya gerakan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan

dan penataan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi; Pemerintah Desa menyelenggarakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan atau BUMDes; lalu diperkuat oleh pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; Kepala Desa berwenang menetapkan tata guna tempat atau ruangan serta lokasi di pasar. Meskipun pasar Landungsari termasuk proses dari pembangunan, namun hanya sebagian kios saja yang beroperasi sedangkan kios-kios yang lain dialih fungsikan menjadi tempat tinggal bagi beberapa orang. Penyelenggaraan pasar Desa Landungsari lebih menekankan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Sehingga pengorganisasian menjadi salah satu aspek pengelolaan dengan tujuan masyarakat sekitar Desa Landungsari dapat berpartisipasi dan meningkatkan perekonomian dengan adanya pasar desa. Namun hal ini tidak sesuai dikarenakan tidak sinkronnya peraturan desa tentang BUMDes. Pada dasarnya BUMDes Desa Landungsari mengatur tentang pasar desa karena mempunyai output yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Namun, kenyataannya BUMdes Desa Landugsari tidak terlalu berperan didalamnya. Hal tersebut dikarenakan pembentukan panitia dari kepala desa dan perangkat desa yang perannya menggantikan BUMDes.

c. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan panitia pengelola pasar Landungsari masih belum terlihat sepenuhnya. Panitia pengelola pasar sebagai kontrol untuk mengarahkan masyarakat dalam menempati kios justru bertindak sebagai

penerima manfaat. Panitia pengelola pasar menempati beberapa kios kosong untuk berjualan. Pengarahan lebih banyak dilakukan sesama panitia pengelola pasar dan masyarakat sebagai arah dan tujuan pembangunan tidak didahulukan. Pengarahan yang terlibat tidak menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Pengarahan hanya dilakukan melalui satu komunikasi dari atas ke bawah sehingga masyarakat yang ingin menempati kios harus memenuhi persyaratan mutlak dari pihak panitia pengelola pasar.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan pasar desa dilakukan oleh panitia pengelola pasar. Panitia pengelola pasar desa masih kurang dalam pengawasan dikarenakan berbagai permasalahan internal. Kegagalan ini dapat disebabkan konsep *control top-bottom* yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Pengelolaan pasar Desa Landungsari termasuk *non-participation* dikarenakan, dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan pasar desa tersebut.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Faktor Internal

- 1) Kesenjangan yang terjadi dalam panitia pengelola pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari panitia pengelola pasar yang menyewa kios di Pasar Landungsari dan bertindak sebagai *user*.
- 2) Tidak transparannya dan konflik panitia pengelola pasar. Sikap tidak transparan dari panitia pengelola pasar dilihat dari kewajiban dan kewenangan yang tidak sesuai dengan peran panitia pengelola pasar.
- 3) Kurangnya komunikasi antar panitia pengelola pasar. Komunikasi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan berbagai perubahan-perubahan nilai dan sikap di dalam proses pembaharuan dan pembangunan tanpa menimbulkan tekanan, frustrasi dan friksi.
- 4) Disfungsinya kios karena penyewa user sebagian adalah panitia pengelola pasar itu sendiri. Panitia pengelola pasar menyewa kios untuk disewakan kembali sehingga adanya reaksi negatif dari masyarakat setempat.

b. Faktor Eksternal

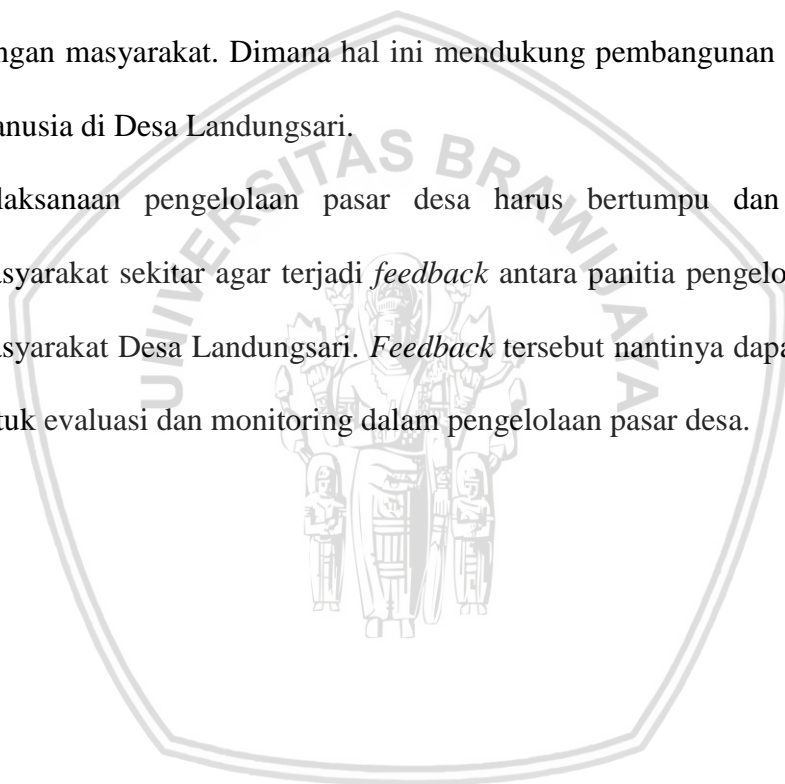
- 1) Letak Pasar Desa Landungsari kurang strategis. Hal tersebut dapat dilihat dari letak pasar di dalam perkampungan tepatnya dibelakang Terminal Landungsari. Selain itu aksesibilitas menuju pasar masih terkendala, akses menuju pasar hanya dari bagian barat Pasar Landungsari.

- 2) Kurangnya antusiasme masyarakat Desa Landungsari dalam mengisi kios-kios di pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kios-kios, toko, dan Los atau *bedak* yang tersewa oleh *user* hanya terdapat pada bagian depan dan beberapa.

B. Saran

- 1) Perlunya perencanaan yang matang terkait pembangunan pasar Landungsari mulai dari sistem hingga peraturan yang jelas dan transparan terkait pengelolaan pasar desa.
- 2) Perlu adanya peraturan yang jelas terkait siapa saja yang berhak bertindak sebagai penyewa tempat (*user*) di Pasar Landungsari, serta peraturan tentang pelunasan biaya administrasi yang transparan.
- 3) Perlunya koordinasi yang baik antar panitia pengelola pasar mulai dari pimpinan hingga anggota sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan dan berorientasi untuk mengembangkan Pasar Landungsari demi membangun masyarakat Desa Landungsari.
- 4) Peran dan tugas pengelola pasar desa difokuskan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan informasi terkait proses administrasi dalam penyewaan tempat (Kios, *Bedak*, Los) dan peluang untuk menempati kios yang telah disediakan di Pasar Landungsari.
- 5) Perlu adanya arahan dari Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada panitia pengelola pasar untuk menggunakan konsep partisipasi masyarakat. Panitia pengelola pasar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berkecimpung di dalam pembangunan pasar desa. Mulai dari perumusan hingga berjalannya kegiatan pasar desa.

- 6) Panitia pengelola pasar perlu memperjelas akses menuju pasar seperti menambahkan penunjuk arah menuju pasar. Hal tersebut digunakan untuk mengurangi permasalahan aksesibilitas dan untuk memberitahukan lokasi Pasar Desa Landungsari.
- 7) Dalam pembentukan panitia pengelola pasar lebih berorientasi untuk masyarakat desa. Komposisi kepanitiaan harus seimbang antara perangkat desa dengan masyarakat. Dimana hal ini mendukung pembangunan Sumberdaya Manusia di Desa Landungsari.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan pasar desa harus bertumpu dan melibatkan masyarakat sekitar agar terjadi *feedback* antara panitia pengelola pasar dan masyarakat Desa Landungsari. *Feedback* tersebut nantinya dapat digunakan untuk evaluasi dan monitoring dalam pengelolaan pasar desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Kartasasmita, Ginanjar. 2007. *Administrasi Pembangunan*. www.ginanjar.com
- M. Darwis, 1984, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Skripsi S-1.Fak. Teknik.Jur.Arsitektur, Universitas Gajah Mada.
- Miles, huberman, saldana. 2014.*Qualitative Data Analysis*. Singapore: Sage Publication
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto & Kartodirjo, Sartono. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit: Liberty, cetakan pertama
- Mufiz. Ali, 1985, *Pengantar Administrasi Negara*, Penerbit Kurnia UT Jakarta
- Muluk, Khairul, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*, Malang: LPD FIA UB dan Bayu Media.
- Ndraha, Talizuduhu, 1990 *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta Utama, Jakarta.
- Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Landungsari
- Rival G, Ahmad dik. 2003. *Parlement ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi ke 2 Tahun 2003*, PSHK Jakarta
- Sastropetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni Cetakan 1

Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan : konsep, Dimensio, dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta.

_____, 2005. *Manajemen Stratejik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas*. Mandar Maju. Bandung.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: CV Alfabeta

_____, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung . Alfabeta

Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 6.

Supriatna Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta. Jakarta.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negri Malang (UM Press)

_____, 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negri Malang (UM Press)

Sutoro, Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press

Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 30

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta

_____. 1986; *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit PT Gunung Agung Jakarta. Jakarta.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

Sastropoetro, Santoso. R.A. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.